

**IMPLEMENTASI PROGRAM
BLOCKGRANT PEMBERDAYAAN
KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU
GURU**

(Studi di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

VITA UZLIFATUL ILMA

NIM.0810310136



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

MOTTO

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu seseorang yang dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.

(Tom Bodett)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan
Kelompok Kerja Guru (KKG) Dalam Rangka
Meningkatan Mutu Guru** (Studi di Sekolah Dasar
Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)

Disusun Oleh : Vita Uzlifatul Ilma

NIM : 0810310136

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 27 Maret 2014

Komisi Pembimbing

Ketua Pembimbing

Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc
NIP. 19560801 198701 1 001

Anggota Pembimbing

Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 22 April 2014
 Jam : 08.00 WIB
 Skripsi atas nama : Vita Uzlifatul Ilma
 Judul : **Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan
 Kelompok Kerja Guru (KKG) Dalam Rangka
 Meningkatkan Mutu Guru (Studi di Sekolah Dasar
 Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)**

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc
 NIP. 19560801 198701 1 001

Anggota

Drs. Minto Hadi, M.Si
 NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota

Dr. Choirul Saleh, M.Si
 NIP. 19600112 198701 1 001

Anggota

Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
 NIP. 19730713 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 27 Maret 2014

METERAI
TEMPEL

PAJAK PEMERINTAH BANGSA
1917

7EC18AAF416347520

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP



Vita Uzlifatul Ilma

Nama: VITA UZLIFATUL ILMA

NIM : 0810310136

RINGKASAN

Vita Uzlifatul Ilma, 2014, **Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru (Studi di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)**, Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc, Drs. Minto Hadi, M.Si, 132 halaman + xxi

Pendidikan merupakan faktor utama dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan tolak ukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, dalam kenyataannya tingkat pendidikan di Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah mutu dari tenaga pendidik itu sendiri. Guru sebagai faktor utama dalam bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Untuk meningkatkan mutu dan kinerja para guru ini, pemerintah mengeluarkan dana bantuan yang disebut dengan program *blockgrant* dalam meningkatkan mutu guru ini. Bantuan *blockgrant* ini disalurkan melalui salah satu organisasi guru yaitu Kelompok Kerja Guru (KKG). Salah satu KKG yang menerima dana bantuan *blockgrant* ini adalah Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lamongan mempunyai kesenjangan waktu pelaksanaan program *blockgrant* yang direncanakan pada tahun 2007 namun baru bisa dilaksanakan pada tahun 2010.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis domain menurut James Spradley. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru. Selanjutnya diperoleh gambaran secara umum mengenai masalah yang akan dibahas yaitu masalah implementasi program serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi program *blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru meliputi empat proses yaitu sosialisasi, pengajuan proposal, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. Implementasi program berjalan efektif dengan diadakannya pelatihan atau *Workshop*. Pelatihan/*Workshop* yang diberikan meliputi Penilaian Kinerja Guru (PK Guru); Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); Program Induksi Guru Pemula; dan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa. Untuk dapat mengetahui tingkat potensi diri guru/pendidik maka dilaksanakan pelatihan Pre tes (Tes awal) yang berguna dalam menjajaki proses pelatihan yang akan dilaksanakan, dan Post tes (Tes Akhir) yang berguna dalam melihat keberhasilan pelatihan. Program ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung mempunyai pengaruh yang baik dalam meningkatkan mutu guru khususnya di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Kata kunci: Implementasi Program, *Blockgrant*, Mutu Guru

SUMMARY

Vita Uzlifatul Ilma, 2014, **The Implementation of Empowerment *Blockgrant* Program through Teacher Work Group (TWG) for Improvement of Teacher's Quality (Study at Elementary School Cluster 02 in Tikung Subdistrict, Lamongan Regency)**, Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc, Drs. Minto Hadi, M.Si, 132 pages + xxi

Education is the main factor in the development process. This is because education is the way to measure the quality of human resource in a country. However, the level of education in Indonesia is still low when compared to other countries in Southeast Asia. One of factor that influence education is the quality of teacher. Teacher has a role in creating qualified young generation. To improve the quality and performance of these teacher, the government make a program that called blockgrant's program to enhance the quality of teacher. Program of blockgrant is given through the one of teacher's organization, namely Teacher Working Group (TWG). The one of TWG that is received blockgrant's program is Elementary School Cluster 02 Tikung Subdistrict Lamongan Regency. This is because there are a time gap of blockgrant planned implementation in Lamongan Regency that must be implemented in 2007, but can only implemented in 2010.

The research was a qualitative descriptive study using the technique of domain analysis by James Spradley. This method is to find the detail about the implementation of blockgrant's program in Teacher Working Group (TWG) to improve the quality of teacher. Furthermore, obtained a general overview of the issues is the problem of program implementation and the factors that influence it.

From this study, it can be seen that the implementation of the blockgrant's program in order to improve the quality of teachers includes four processes such as socialization, making of proposal, disbursement of fund and implementation of programs. The implementation of program is to be effective by the holding of training or workshop. Training/Workshop will include Teacher Performance Assessment; Sustainable professional development; Beginner Teacher Induction Program; National Character and Cultural Education. To determine the level of self-potential of teacher then conducted training Pretest to explore the process of training and posttest to see the successful of the training. The program aims to improve the quality of education nationwide. It can be concluded that the implementation of blockgrant's program through Teacher Working Group (TWG) at the Elementary School Cluster 02 Tikung Subdistrict force has a good effect in improving the quality of teachers, especially in the Tikung Subdistrict Lamongan Regency.

Keywords: Implementation of Program, Blockgrant's, Quality of Teacher

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Alhamdulillah engkau telah mempermudah jalan hamba ya ALLAH.

Terima kasih kepada ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan dan semangat yang sangat besar. Hidup ini saya dedikasikan untuk ayah dan ibu karena mereka telah membuatku nyaman setiap saat. Untuk adek-adekku dan kakak-kakakku terima kasih karena telah memberikan kebahagiaan di saat-saat sulit dan mau mendengarkan curhatan masalahku. Tiada kata yang sanggup mengungkapkan betapa besar rasa sayangku kepada kalian LOVE YOU FOREVER.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku, sahabat kepompong yang paling ku cintai Ulfatul Yunas (si Sexy), Vifin Rofiana (si Jenius), Yunita Noermala (si Perfect). Abrilia (si Bawel), Annisa Wulan (si Keppo) yang selalu ada di saat suka dan duka, teman berkuliner klo ada tempat makan baru dan tanpa kalian mungkin hidup ini takkan serame ini. Kalian yang telah setia menemaniku, memberiku semangat, kalian sahabat sekaligus keluarga bagiku, semoga kita selalu bersama-sama sampai kapanpun, Amien...

Terima kasih kepada teman-teman sepermainan yang ku sayangi pudew, ndutti, riris, heny, junjun, dll yang selalu

memberiku semangat disaat males ngerjain skripsi, kalian selalu ada disaat aku pengen refresing, hanting makanan dan shopping. Dan kamar kost ku yang dengan setia aku tiduri dan aku kotori, makasih sudah member kenyamanan buatku mengerjakan semua tugas dan skripsiku.

Terima kasih kepada seseorang yang selama ini selalu ada untukku dan tidak capek-capeknya ngasih nasehat, dukungan dan semangat buat nyelesein skripsi, dia adalah pacar, kakak dan sahabat untukku Yudha Karismawan. Hanya satu kata yang bisa aku ucapkan ke dia thanks for everything you do for me. Sepertinya tiada hari terlewatkan tanpamu, saat aku jenuh dengan skripsi, saat aku suntuk dengan rutinitas, kau yang selalu mengiburku, kita berdua seperti sinyal telepon yang selalu ada setiap waktu. LOVE YOU PICHU...

Untuk keluarga besarku, terima kasih buat omelannya dan doanya sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih juga untuk semua pihak-pihak yang telah berpengaruh dalam skripsiku ini tukang rental print, tukang fotocopy, tukang warnet, penjual makanan, penjual jajanan tanpa kalian semua gak mungkin aku bisa mengerjakan skripsi dengan lancar.

Matur Suwun... Terima Kasih... Thank You...

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Dalam Rangka Peningkatan Mutu Guru” (Studi di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Dosen Pembimbing dan Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk

membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

5. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si dan Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Dosen Penguji Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi masukan, semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Ibu Umu Zuhro, S.Pd selaku Penanggung Jawab Pelatihan/Workshop Blockgrant dan Bapak Kadis, S.Pd selaku Ketua pelaksana dan Ketua KKG gugus 02 Kecamatan Tikung. Panitia dan anggota peserta pelatihan/Workshop Blockgrant yang telah membimbing dan membantu proses penyusunan skripsi penulis.
7. Kedua orang tua, Bapak Drs. Anas Tohir Ubbet, M.Pd, Ibu Elya Utami, S.Pd, yang telah memberi doa, semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
8. Saudara seperjuangan selama kuliah Abril, Ulfa, Ica, Vifin, Yunita, Ayu, Habibi beserta rekan-rekan angkatan 2008 untuk kerjasama yang istimewa.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi

maupun pembahasan, Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya penulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 27 Maret 2014

Penulis



DAFTAR ISI

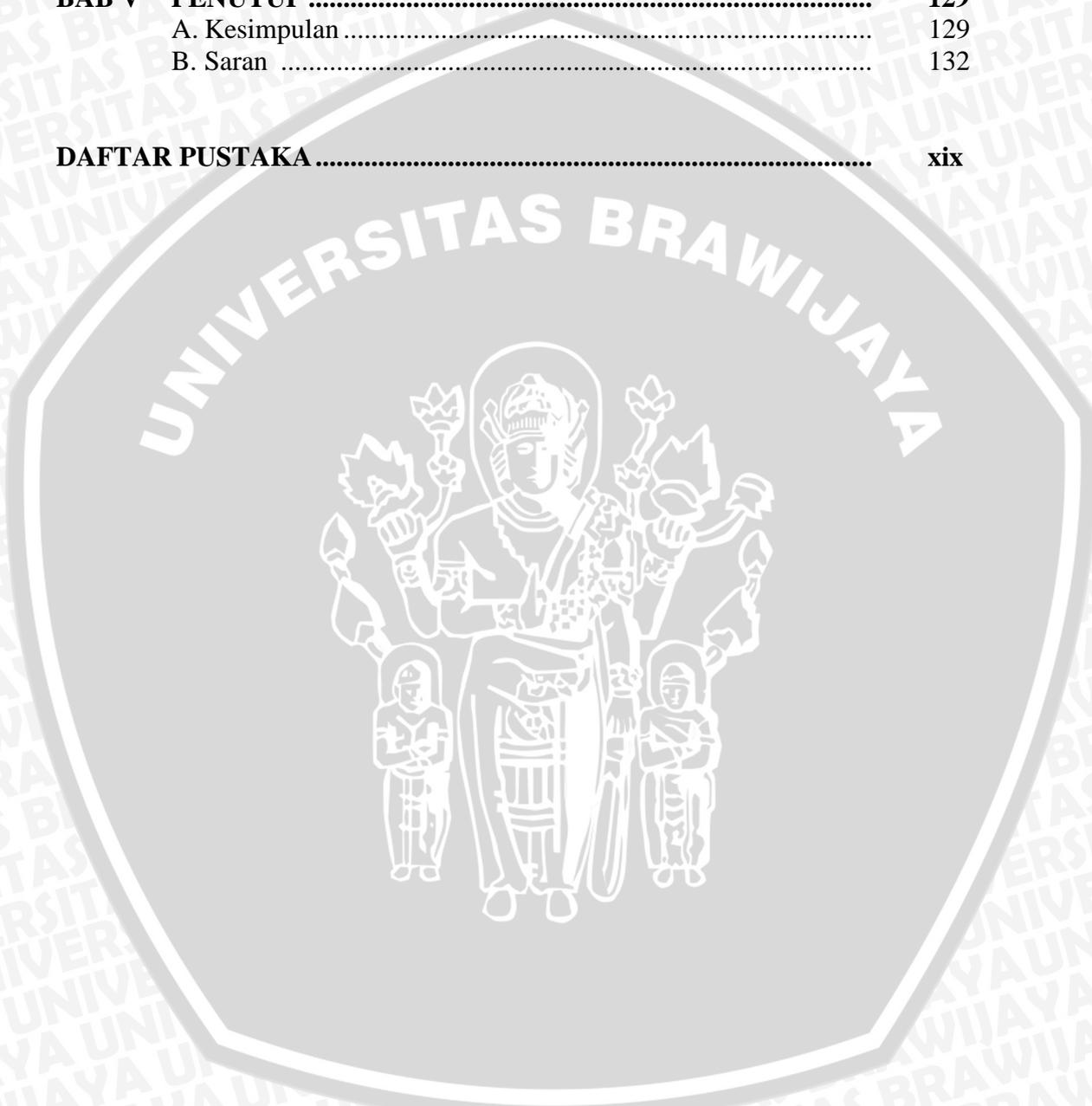
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Implementasi Program	15
1. Definisi Implementasi	15
2. Definisi Program	17
3. Definisi Implementasi Program	19
B. Pemberdayaan Guru	22
1. Definisi Pemberdayaan	22
2. Definisi Guru	24
3. Definisi Pemberdayaan Guru	26
C. Mutu Guru	30
1. Definisi Mutu	30
2. Definisi Mutu Guru	33
D. Partisipasi	44
1. Definisi Partisipasi	44
2. Bentuk Partisipasi	47
3. Partisipasi dalam Konteks Pendidikan Sekolah	48
4. Indikator Keberhasilan Partisipasi	50
E. Teori Regulasi	52
1. Pengertian Teori Regulasi	52

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Fokus Penelitian.....	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kabupaten Lamongan	64
2. Kecamatan Tikung	69
B. Gambaran Umum Program <i>Blockgrant</i> dalam Pendidikan ..	72
1. Sejarah Program <i>Blockgrant</i> Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	72
2. Dasar Hukum	73
3. Tujuan	75
4. Sasaran	76
5. Hasil Yang Diharapkan	76
C. Penyajian Data	77
1. Implementasi Program <i>Blockgrant</i> Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru.....	77
a. Sosialisasi	77
b. Pengajuan Proposal	81
c. Pencairan Dana	84
d. Pelaksanaan Program <i>Blockgrant</i> Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG).....	88
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program <i>Blockgrant</i> Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru.....	114
a. Faktor Pendukung.....	114
b. Faktor Penghambat	115
D. Analisis Data	117
1. Implementasi Program <i>Blockgrant</i> Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru.....	117
a. Sosialisasi	117
b. Pengajuan Proposal	118
c. Pencairan Dana	120
d. Pelaksanaan Program <i>Blockgrant</i> Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	121
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program <i>Blockgrant</i> Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru	125

a. Faktor Pendukung.....	125
b. Faktor Penghambat.....	127

BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	132

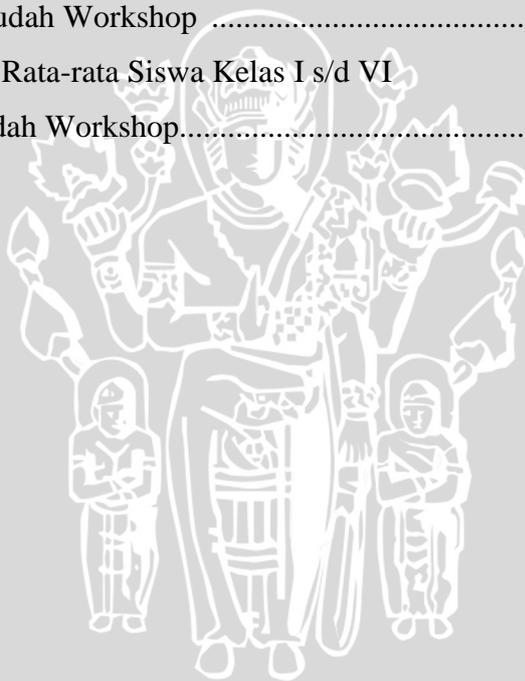
DAFTAR PUSTAKA	xix
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Kondisi Pendidikan Guru dan Ruang Kelas	6
2	Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Pendidikan Yang Ditamatkan, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Dan Angka Melanjutkan	66
3	Fasilitas Pendidikan	68
4	Rasio Murid/Guru Untuk Jenjang Pendidikan Dari Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, SMP/MTS, SMA/SMK/MA....	68
5	Data Lembaga Pendidikan SD/MI Kecamatan Tikung.....	70
6	Data Perkembangan Siswa SD/MI Kecamatan Tikung	71
7	Sistem Pembinaan Profesional Gugus Sekolah Dasar Di Kecamatan Tikung	71
8	Jadwal Pelatihan/Workshop Blockgrant Guru SD Negeri seGugus 02 Kecamatan Tikung	91
9	Jadwal Penyaji materi / Nara Sumber Workshop Blockgrant Guru SD Negeri seGugus 02 Kecamatan Tikung	92
10	Daftar Peserta Pelatihan / Workshop Blockgrant Guru SD Negeri seGugus 02 Kecamatan Tikung	93
11	Daftar Panitia Pelaksana Pelatihan / Workshop Blockgrant Guru SD Negeri seGugus 02 Kecamatan Tikung	97
12	Daftar Hadir Peserta Pelatihan / Workshop Blockgrant Guru SD Negeri seGugus 02 Kecamatan Tikung	100
13	Hasil Daya Serap Materi Pelatihan / Workshop Blockgrant Guru SD Negeri seGugus 02 Kecamatan Tikung	100
14	Hasil Terbaik Daya Serap Materi Pelatihan / Workshop Blockgrant Guru SD Negeri seGugus 02 Kecamatan Tikung	101
15	Penggunaan Dana Anggaran Blockgrant Pada Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG) Gugus Sekolah 02 Kec Tikung	101
16	Hasil Angket terhadap Materi Test (Pre Test) Tahun 2011	

	Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG) Gugus Sekolah Kecamatan Tikung	103
17	Hasil Angket terhadap Materi Test (Post Test) Tahun 2011 Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG) Gugus Sekolah 02 Kecamatan Tikung	106
18	Rekapitulasi Kompetensi Peningkatan Mutu Guru Sebelum dan sesudah Workshop.....	111
19	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Mata Pelajaran Siswa Kelas I s/d VI Sebelum Workshop.....	112
20	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Mata Pelajaran Siswa Kelas I s/d VI Sesudah Workshop	112
21	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Siswa Kelas I s/d VI Sebelum dan sesudah Workshop.....	113



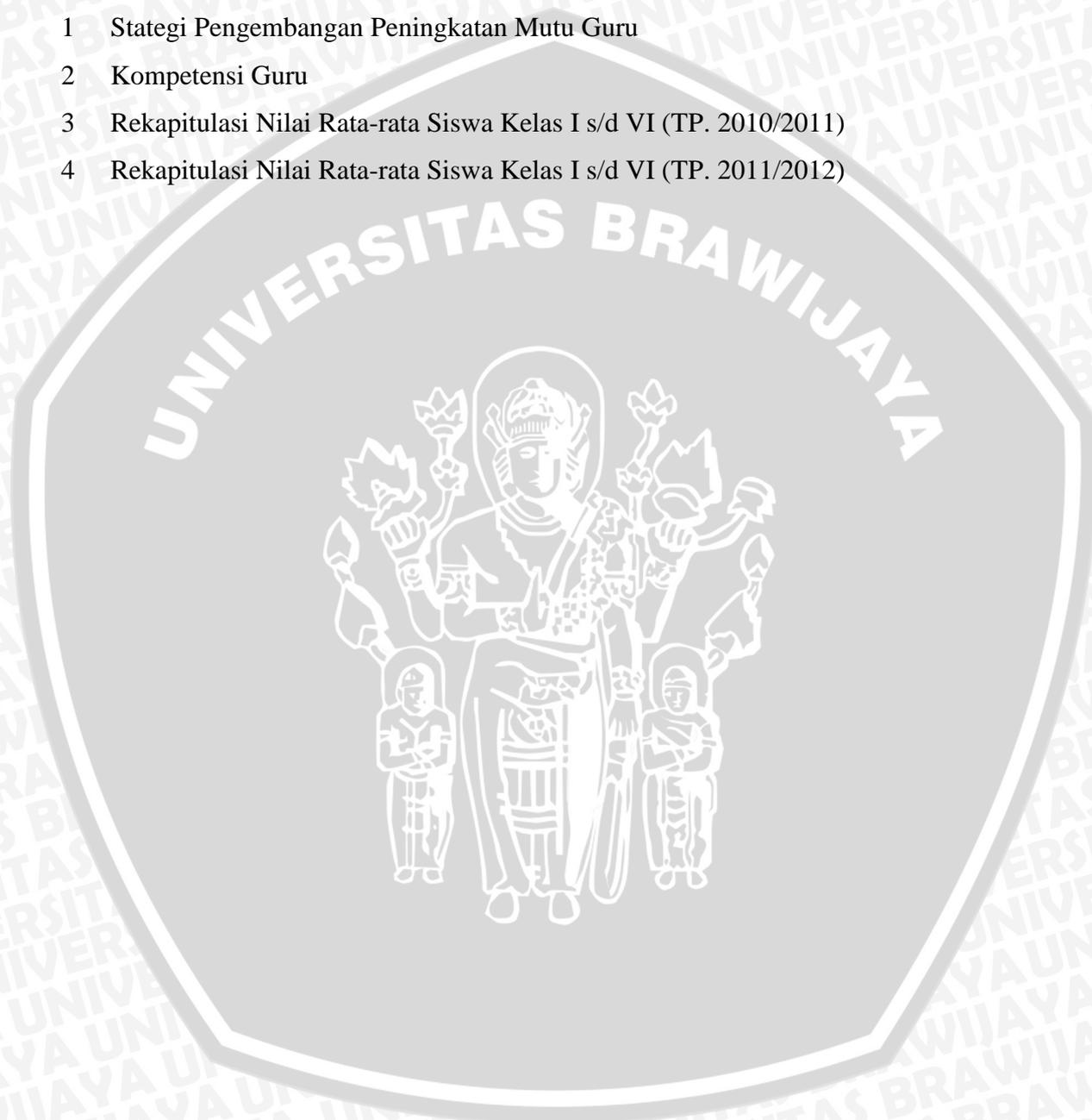
DAFTAR GAMBAR

No	JudulHal	
1	Model Kesesuaian Implementasi Program Korten	20
2	Proses Sosialisasi Pogram <i>Blockgrant</i> Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	80
3	Pengajuan Proposal KKG Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung	83
4	Alur Pencairan Dana <i>Blockgrant</i>	87
5	Struktur Organisasi KKG dalam Gugus Sekolah Se Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1	Stategi Pengembangan Peningkatan Mutu Guru	
2	Kompetensi Guru	
3	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Siswa Kelas I s/d VI (TP. 2010/2011)	
4	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Siswa Kelas I s/d VI (TP. 2011/2012)	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional yang secara menyeluruh merupakan satu sistem yang dikenal Sistem Pendidikan Nasional merupakan perwujudan dari amanat Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada pemerintah Negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsanya agar mampu meningkatkan tugas kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita luhur yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945, alinea 4)”.

Hal ini mengandung pengertian bahwa dari keseluruhan sistem Pendidikan Nasional dengan segala bentuk implementasinya adalah mutlak menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia yang telah dijabarkan dalam Undang–Undang Dasar 1945 sebagaimana telah disebutkan dengan jelas dalam pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 sebagai berikut:

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Lebih lanjut telah diuraikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional tersebut harus ada acuan dan ukuran tentang standar dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang ada dilaksanakan di seluruh wilayah tanah air Indonesia sehingga hasil pendidikan yang diharapkan dan menjadi tujuan pendidikan itu sendiri dapat terukur sesuai standar yang ditetapkan. Standar pendidikan ini telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam bab IX pasal 35 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab II pasal 2 ayat 1 telah diuraikan dengan sangat jelas tentang standar pendidikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diuraikan dalam 8 standar pendidikan nasional.

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;

- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, Departemen Pendidikan Nasional dalam Nursisito (2003:49) menyebutkan 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu:

- 1) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan *education production function/ input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Dalam pendekatan ini, lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila semua *input* diperlukan dalam produksi tersebut, misalnya pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pengajaran, serta perbaikan sarana dan prasarana terpenuhi, maka *output* (mutu pendidikan) secara otomatis akan terjadi. Dalam aplikasinya, pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada *input* pendidikan dan kurang memperhatikan proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan birokratik sentralistik. Pola ini menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan keberadaannya pada keputusan birokrasi dengan jalur yang panjang dan terkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Implikasinya, sekolah kehilangan motivasi, kemandirian dan inisiatif untuk mengembangkan, memajukan dan mengembangkan lembaga serta mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional;
- 3) Peran serta masyarakat khususnya wali peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana) dan bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas) sebagai upaya untuk meminimalisir permasalahan diatas, maka dunia pendidikan harus dibenahi dan dilaksanakan reorientasi penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya dalam pembahasan ini lebih dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional baik dalam sistem manajemen pendidikan oleh tenaga kependidikan yang profesional dan juga pelaksanaan pembelajaran oleh pendidik yang juga harus memiliki standar kualifikasi profesional sehingga mampu melaksanakan pembelajaran yang profesional, bermutu dalam mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Rekrutmen atau penerimaan pendidik sebagaimana standar kualifikasi pendidikan sebagaimana telah diatur dengan tegas bahwa pendidik yang diangkat baik oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Perlu dipahami bahwa standar kualifikasi dan profesionalitas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut itu ditetapkan pada tahun 2007 sementara penyelenggaraan pendidikan sebagai amanat Undang–Undang Dasar 1945 sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka. Rekrutmen pendidik saat itu sampai dengan tahun

ditetapkannya permendiknas penyelenggaraan pendidikan di tanah air Indonesia sudah berjalan. Hal tersebut belum mengacu pada standar–standar sebagaimana dalam permendiknas tersebut, sehingga penyelenggaraan pendidikan belum banyak yang memenuhi standar tersebut.

Sesuai dengan PP Nomor 19 pasal 29 dan pasal 42 masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, ruang kelas yang tidak standar, pendidik yang asal ada dan masih banyak lagi hal-hal lain dalam penyelenggaraan pendidikan yang jauh dari ukuran standar–standar tersebut. Oleh sebab itu harus ada upaya pemberdayaan menyeluruh terhadap tulang punggung pendidikan itu sendiri yaitu pendidik yang belum sesuai dengan standar sebagaimana permendiknas tersebut. Dalam hal ini pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban dengan perencanaan yang jelas dan target yang terukur dalam memberdayakan pendidik baik yang menyangkut standar kualifikasi pendidiknya, penguasaan kurikulumnya, penguasaan strategi pembelajarannya, penggunaan media pembelajarannya, sistem evaluasinya, manajemen pengendalian mutu pendidikannya dan masih banyak lagi yang menjadi harapan agar seluruh pendidik benar–benar standar baik kualifikasinya maupun profesionalitasnya.

Penduduk Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan berdasarkan data profil pendidikan Kecamatan Tikung pada tahun 2011, luas wilayah mencapai 52,99km². Dari demografi diketahui jumlah penduduk yang ada sebesar 41.483 jiwa. Sedang profil untuk tingkat Sekolah Dasar Gugus 02

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Kondisi Pendidikan Guru dan Ruang Kelas

NO	NAMA SEKOLAH DASAR	IJASAH TERTINGGI GURU							Σ JML	LOKAL/RUANG			Σ JML
		S1	S2	D3	D2	SPG	SMA	SMP		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Bangkalan Pule I	8	-	-	2	-	2	-	12	6	-	-	6
2.	Bangkalan Pule II	6	-	-	1	-	3	1	11	2	3	3	8
3.	Dukuh Agung I	5	-	1	1	2	2	-	11	6	-	-	6
4.	Dukuh Agung II	5	-	-	6	-	-	-	11	-	3	3	6
5.	Pengumbulanadi I	4	-	-	2	3	-	-	9	4	-	2	6
6.	Pengumbulanadi II	2	1	-	4	2	3	-	12	3	-	3	6
7.	Guminingrejo	8	-	-	-	1	-	1	10	-	3	3	6

Sumber: Laporan Bulan April Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, 2011

Dari tabel di atas diketahui mengenai tingkat pendidikan guru. Hampir 60 persen guru yang ada di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan adalah berpendidikan sarjana, tetapi 20 persennya masih belum memenuhi standar minimum pendidikan guru. Pentingnya mengetahui kondisi guru adalah agar bisa mengetahui kelayakan guru yang ada di sekolah tersebut. Dan ditambah lagi kondisi sarana dan prasarana yang juga penting, karena sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Seperti di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan ini terdapat ruangan belajar yang dalam kondisi rusak ringan, rusak berat dan ada juga ruangan yang masih baik di setiap sekolah.

Rekrutmen pendidik yang baru memang harus sesuai dengan standar kualifikasi dan standar profesionalitas sebagaimana peraturan menteri pendidikan tersebut mutlak untuk dilaksanakan setelah diperoleh tenaga pendidik yang ada harus dilatih sesuai dengan standar-standar tersebut melalui pelatihan sebelum melaksanakan sesuai dengan tugas jabatan pendidik yang dikenal *pre service training*. Sementara tenaga kependidikan yang sudah ada diangkat sebelum lahirnya standar permendiknas tersebut harus diberdayakan dan ditingkatkan baik kualifikasi pendidikannya maupun profesionalitasnya sehingga diharapkan seluruh pendidik yang ada harus standar sebagaimana standar permendiknas. Pola pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan ini yang dikenal dengan program *in service training*.

Mengingat jumlah pendidik yang ada belum sesuai dengan standar permendiknas masih sangat banyak maka program pemberdayaan *in service training* ini harus dilaksanakan secara sistematis, terukur dan berkesinambungan mengingat pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah ini telah menyebar di seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke butuh perencanaan dan pembiayaan yang sistematis sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di samping program pemberdayaan pendidik yang belum sesuai dengan standar tersebut masih sangat banyak, sementara tuntutan pembaharuan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat ini juga menuntut adanya pemberdayaan pendidik secara keseluruhan untuk terus menerus dilakukan pemberdayaan agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi tersebut, maka benar-benar tugas pemerintah dan pemerintah daerah sangat besar dan berat, sehingga banyak didesain organisasi pemberdayaan pendidik itu melalui organisasi Sistem Pembinaan Profesional (SPP) yang keberadaannya dibentuk secara mandiri dalam kelompok kerja yang beranggotakan 5 (lima) lembaga pendidikan sampai maksimal 8 (delapan) lembaga pendidikan yang tersebar di kecamatan–kecamatan di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Struktur organisasi sistem pembinaan profesional itu yang kemudian diberikan nama Gugus Sekolah di dalamnya terdiri dari Kelompok Kerja Guru atau disebut KKG, kelompok Kerja Kepala Sekolah atau KKKS dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah disingkat KKPS. Dibentuklah tempat sekretariat untuk tempat pertemuan diskusi dan pemberdayaan pendidik yang ada dalam wilayah gugus tersebut yang selanjutnya ditunjuk sekolah yang memiliki sarana yang lebih sebagai Sekolah Inti dalam Gugus tersebut. Agar gerakan pemberdayaan dapat efektif efisien, maka dilaksanakan pemberdayaan pendidik itu dengan acuan dari identifikasi dan analisis hasil *supervise* yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sehingga materi diskusi dan pemberdayaan tersebut benar–benar efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pemberdayaan yang telah dijadwalkan dalam rencana kerja gugus sekolah, tidak seluruhnya program itu didanai oleh pemerintah akan tetapi dilaksanakan secara mandiri sehingga jika ini dapat dilaksanakan dengan konsisten maka program pemberdayaan

pendidik melalui Gugus Sekolah ini sangat efisien dan efektif sekali dan betapa luar biasanya pencapaian target gerakan pemberdayaan secara mandiri tersebut mampu meningkatkan kualifikasi dan profesionalitas pendidik diseluruh wilayah tanah air Indonesia menuju pencapaian standar-standar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam permendiknas. Agar dalam perjalanan pemberdayaan pendidik secara menyeluruh dapat dilakukan tidak hanya berorientasi terhadap pemecahan masalah yang muncul dari analisis hasil *supervise*, maka pelaksanaan kegiatan sistem pembinaan profesional ini senantiasa dikendalikan dan dibina oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang dikenal dengan sebutan LPMP yang didirikan di setiap wilayah tanah air, yang di dalamnya banyak terdapat tenaga profesional widyaiswara (Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah) yang terus menerus mengadakan pembinaan profesionalitas pendidik utamanya adanya pembaharuan-pembaharuan yang menjadi tuntutan percepatan pendidikan yang terus menerus tiada hentinya berubah dan berubah sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Untuk kesinambungan program pemberdayaan pendidik itu sesuai dengan program yang dirancang oleh menteri pendidikan yang dituangkan dalam kebijakan Menteri Pendidikan lahirilah program peningkatan profesionalitas pendidik itu yang langsung dilaksanakan dengan bentuk

sharing oleh LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) dan Tenaga yang ada di masing-masing kabupaten/kota yang disebut program pemberdayaan pendidik melalui proyek *blockgrant* sehingga adanya pembaharuan kebijakan pendidikan itu dapat secepatnya sampai kepada Guru dan Kepala Sekolah sebagai otoritas terakhir dalam pelaksanaan pendidikan tersebut.

Kebijakan program *blockgrant* KKG ini sendiri baru di buat pada tahun 2007 dan diterapkan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2010. Dana *blockgrant* tersebut bisa dipergunakan untuk bangunan gedung sekolah, beasiswa pelajar/mahasiswa dan bantuan untuk peningkatan mutu guru. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Kepala LPMP Jawa Timur Nomor: 2429//J32/LL/2011 Tanggal 12 Oktober 2011. Sebagai tindak lanjut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru (Studi pada Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang terdapat di dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Dapat menambah wawasan baru dalam berpikir, analisis dan membandingkan keadaan nyata di lapangan dengan teori-teori yang ada dan yang telah dipelajari pada perkuliahan.

- b. Sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk memberikan program yang tepat sasaran kepada masyarakat kependidikan demi meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia.
- b. Menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya mengenai program *blockgrant* dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Agar dalam penulisan skripsi sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan untuk mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca, peneliti mengusahakan untuk menyusunnya secara sistematis. Uraian didalamnya terdiri dari beberapa bab dan untuk itu peneliti telah menetapkan sistematikannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang penelitian dan alasan pemilihan judul, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini peneliti menguraikan secara umum tentang kajian pustaka atau tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Sumber-sumber bacaan, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang dipandang perlu sebagai dasar argumen dari para ahli untuk melengkapi kebenaran dari penelitian ini yang dirangkum sedemikian rupa dengan uraian yang logis dan sistematis dan sebagai jawaban sementara (hipotesis) terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam pendahuluan. Bab ini meninjau implementasi Program *Blockgrant*, penjelasan mengenai Pemberdayaan Guru serta Penjelasan tentang Mutu Guru, Partisipasi dan Teori Regulasi.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian.

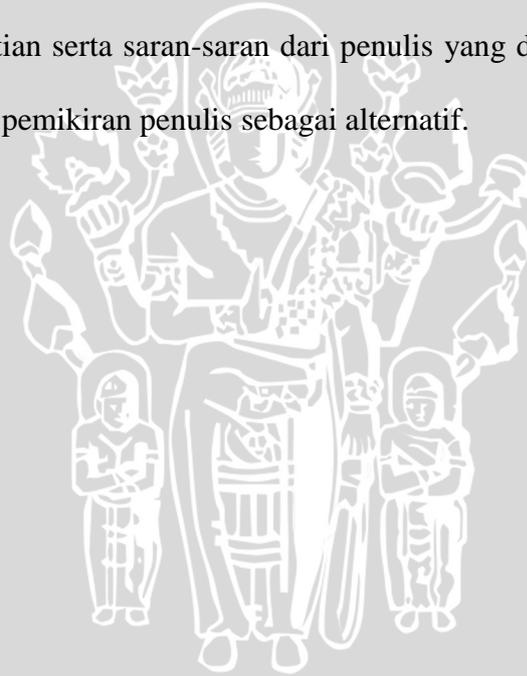
BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang didalamnya menyajikan data hasil pengumpulan data yang sesuai dan mendukung dalam pemecahan masalah dan menganalisa data-data hasil implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu

Guru pada Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan serta hasil penelitian juga mengangkat permasalahan tentang bagaimana program tersebut berjalan dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat berjalannya program pemberdayaan *blockgrant* pada Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang dapat dikemukakan sesuai pemikiran penulis sebagai alternatif.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Program

1. Definisi Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan. Implementasi merupakan aspek terpenting dalam proses keseluruhan sebuah program atau kebijakan. Menurut Cheema dan Rodinelli (dalam Wibawa 1994:19) pengertian implementasi adalah sebagai berikut:

“Dalam pengertian luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan. Dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi diantara merancang dan menentukan sasaran yang diinginkan”.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastier (dalam Abdul Wahab 2008:5) definisi dari implementasi adalah:

“Apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan atau dirumuskan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara baik yang menyangkut usaha-usaha yang mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Lebih lanjut menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2008:64) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri, Agustino (2008:139). Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan, periode implementasi kebijakan bergantung dari proses pencapaian tujuan tersebut. Grindle dalam Agustino (2008:154) mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan menunjuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. *Impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

2. Definisi Program

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Malayu Hasibuan (2006:72) definisi program dapat sebagai berikut: “Program adalah suatu jenis rencana yang konkret karena di dalamnya sudah tercantung sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran dan waktu pelaksanaan”. Adapun definisi program menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah: “Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”. Dari pendapat sebelumnya dapat dikatakan bahwa program merupakan instrumen kebijakan yang digunakan agar terlaksananya suatu kebijakan. Program merupakan unsur terpenting demi terciptanya suatu kegiatan. Menurut Arikunto dan Jabar (2004:34) program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit

yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam sebuah program terdapat beberapa aspek yaitu berupa tujuan kegiatan, aturan yang harus dipegang dalam kegiatan, anggaran atau biaya yang digunakan dan strategi pelaksanaan kegiatan. Melalui program segala sesuatu rencana yang telah disusun dapat dioperasionalkan dengan mudah dan teratur.

Sedangkan menurut Charles O. Jones (1991:296) program merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan mulai melakukan intervensi. Untuk itu harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah tersebut terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. Ada beberapa karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, diantaranya:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program terkadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang jika berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program merupakan alat untuk merealisasikan suatu kebijakan yang di dalamnya terdapat

rangkaian kegiatan yang telah disusun secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan berkesinambungan yang melibatkan banyak orang.

3. Definisi Implementasi Program

Menurut Syukur Abdullah (1987:398) terdapat tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan program, diantaranya adalah:

- a. Adanya program (kebijakan) yang dilakukan.
- b. Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sedangkan menurut Jones (1991:36) terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu:

- a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

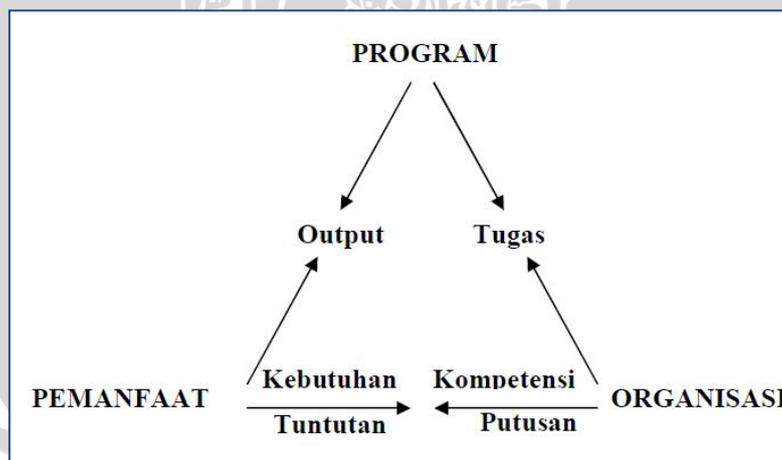
b. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c. Penerapan atau aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program menurut David C. Korten adalah model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian implementasi program menurut Korten dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Gambar 2.1
Model Kesesuaian Implementasi Program Korten

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan atau implementasi program terdiri dari tiga elemen yaitu program itu sendiri, kelompok sasaran atau pemanfaat program dan pelaksana program dalam struktur organisasi. Pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi tiga elemen implementasi program di atas. Yang pertama, yaitu kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksanaan. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedara Akib dan Antonius Tarigan, 2000:12).

Dari beberapa uraian mengenai implementasi program dapat dikatakan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok orang terhadap kelompok sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya berdasarkan apa yang telah disepakati bersama.

B. Pemberdayaan Guru

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Carlzondan Macauley dalam Wasistiono (1987:46) adalah “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya”. Sementara itu, Carver dan Clatter Backdalam Wasistiono (1987:46) mendefinisikan pemberdayaan sebagai “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi”. Selanjutnya Shardlow dalam Risyanti Riza dan Roesmidi (2006: 23) mengatakan bahwa pada intinya “pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”.

Terminologi pemberdayaan sangat bergantung pada sudut pandang para ahli. Ahli manajemen mengaitkan konsep pemberdayaan- dengan peningkatan kemampuan staf; ahli ekonomi menghubungkannya dengan peningkatan produksi kelompok-kelompok ekonomi lemah; ahli kesehatan mengindentikkannya dengan perolehan kesempatan memperoleh fasilitas kesehatan. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu

konsep yang mengarah pada upaya pendayagunaan potensi insani baik yang berada di dalam maupun di luar sistem. *“Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on”* (Ife, 1995: 25). Jika diterjemahkan secara bebas, dapat dimaknai bahwa pemberdayaan merupakan proses membantu individu dan kelompok yang lemah untuk menghadapi berbagai kepentingan secara efektif, dengan membantu mereka belajar dan negosiasi, penggunaan media, mendorong kegiatan politis, memahami bekerjanya suatu sistem dan sebagainya.

Secara sederhana pemberdayaan dalam ruang lingkup manajemen dapat diartikan sebagai “cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan staf kita” (Stewart, 1998:22). Pemberdayaan lebih dari sekedar pendelagasian agar kekuasaan ditempatkan secara tepat sehingga dapat digunakan secara efektif, yakni dekat dengan konsumen. Ini berarti bahwa bukan hanya perlu pelimpahan tugas, melainkan juga pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab secara penuh. Pemberdayaan berkaitan dengan penyerahan pengendalian yang menuntut persiapan dan perencanaan matang. Pemberdayaan justru dapat mendatangkan pengendalian yang lebih baik atas hasil-

hasilnya dalam jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh antara lain waktu, mutu, komitmen dan gagasan.

Pemberdayaan menghasilkan dan menuntut manajemen yang fleksibel. Manajemen yang fleksibel memberdayakan seluruh potensi untuk mengambil keputusan secara cepat berdasarkan visi yang jernih mengenai keberhasilan dan sasaran-sasaran yang jelas. Manajemen yang fleksibel pada hakikatnya berfokus ke depan, mengharapkan perubahan dan bekerja dengan berusaha mengantisipasi tuntutan-tuntutan dimasa depan dan yang ada sekarang ini. Ringkasnya pemberdayaan memungkinkan organisasi-organisasi untuk menanggapi pelanggan dan tuntutan-tuntutan pasar secara cepat, fleksibel dan efisien. Hasilnya adalah berkurangnya pemborosan, penundaan, dan kesalahan, juga terbangunnya suatu tim kerja dengan sumber daya yang dimanfaatkan secara penuh. Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya (Stewart,1998:53).

2. Definisi Guru

Guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yang membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru sebagai salah satu komponen terpenting pada proses belajar mengajar dan pada pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Bahkan seseorang dikatakan sebagai guru tidak hanya cukup "tahu" sesuatu materi yang akan diajarkan, kemudian mengajarkan pada anak didiknya, akan tetapi

guru tersebut mampu melatih beberapa ketrampilan dan sikap mental anak didiknya (*transfer of value*) sekaligus membanggunya.

Tugas guru bukanlah hal yang mudah, guru harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Guru harus dapat memuliakan dan mendidik murid-muridnya dengan budi pekerti yang baik. Dalam hal ini seorang guru yang mampu/berkompetenlah yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dan pengajar sekaligus penentu dari keberhasilan proses belajar mengajar, sebaliknya proses belajar mengajar tidak akan berhasil dengan baik jika diserahkan pada orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Di sinilah arti pentingnya profesionalitas dari seorang guru, terlebih-lebih urusan tersebut adalah urusan yang berhubungan dengan profesi yang menyangkut orang banyak, dalam hal ini yaitu anak didik selaku orang yang menerima jasa dari penerima profesi.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan berfungsi membantu karakteristik pribadinya ke arah yang positif. Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. Disisi lain Uzer Usman (2001:45) memberikan pengertian spesifik tentang guru yaitu “sebagai jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”. Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan

oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.

3. Definisi Pemberdayaan Guru

Pemberdayaan guru dapat dimaknai sebagai upaya memberikan kekuatan kepada guru untuk mengembangkan potensinya sehingga berhasil guna optimal. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat 2 lebih menekankan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.

Iklm yang baik untuk pemberdayaan guru memerlukan pengkondisian melalui kepercayaan (*trust*) dan keterbukaan (*openness*). Indikasi kepercayaan terlihat pada kemampuan kepala sekolah dalam mentolerir kesalahan guru dalam batas-batas yang wajar. Dalam operasional apapun kemungkinan terjadi kesalahan dapat saja terjadi, sekalipun tidak dilakukan pemberdayaan guru. Oleh karenanya, kepala sekolah harus mempercayai guru agar berinisiatif dan membuat keputusan sendiri. Apabila keputusan guru tidak sama dengan keputusan yang dibuat kepala sekolah, guru harus merasa yakin bahwa kepala sekolah mempercayai mereka untuk mengambil resiko yang wajar jika memang diperlukan untuk mencapai tujuan

yang jelas dan disepakati bersama. Pengkondisian berikutnya adalah bahwa guru harus merasa bahwa mereka bisa bicara terbuka dengan kepala sekolah, dapat mengungkapkan keraguan bahkan kritik dengan bebas. Dalam proses pemberdayaan guru hendaknya berlaku seimbang antara harapan kepala sekolah dengan umpan balik yang diharapkan guru.

Dengan mengacu kepada Henry Fayol, Stewart (1998:74) mengemukakan kecakapan-kecakapan yang diperlukan oleh seorang manajer untuk melakukan pemberdayaan. Kecakapan tersebut adalah merencanakan (*planning*), mengkomunikasikan (*communicating*), mengkoordinasi (*co-ordinating*) dan memotivasi (*motivating*). Program pemberdayaan menuntut perencanaan yang cermat. Perencanaan yang terbentuk setelah melalui koordinasi yang jelas karena kegiatan pemberdayaan dilaksanakan secara kolektif. Tingkat keutamaan perencanaan bukan berarti mengabaikan fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti mengendalikan (*controlling*), mengarahkan (*directing*), dan memimpin (*leading*).

Setelah terkondisikan dengan baik, dilanjutkan dengan kepiawaian lainnya (setelah diadaptasikan seperlunya sesuai dengan kepentingan pemberdayaan guru), meliputi:

a. Membuat Mampu (*enabling*),

Yaitu memastikan bahwa guru mempunyai segala sumber daya yang mereka perlukan untuk dapat diberdayakan secara

penuh. Sumber-sumber daya itu mencakup waktu, personal, uang dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Tetapi membuat mampu tidak terbatas pada penyediaan sumber-sumber yang konkret dan dapat diukur saja melainkan juga menyangkut perasaan untuk mengenal kemampuannya sendiri.

b. Memperlancar (*facilitating*),

Yaitu kecakapan paling mendasar yang diperlukan seorang kepala sekolah dalam memberdayakan. Kepala sekolah dituntut untuk meniadakan halangan, rintangan dan penundaan yang menghalangi pekerjaan sebaik-baiknya. Halangan bisa berupa kurang memadainya informasi, kecakapan atau pengetahuan. Halangan dan rintangan menjadi penyebab penundaan-penundaan. Secara organisasional biasanya halangan dan rintangan tersebut berupa sistem dan prosedur. Hal ini bisa dimengerti mengingat sistem dan prosedur merupakan salah satu alat manajemen untuk melakukan pengendalian. Dengan demikian memperlancar berarti memperhatikan apa yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah, lalu menyediakan jalan selampang mungkin. Untuk itu diperlukan komunikasi, sehingga akan terjadi saling tukar informasi antara kepala sekolah dengan guru.

c. Berkonsultasi (*consulting*),

Berkonsultasi dengan pihak-pihak yang diberdayakan (guru) tidak saja berkaitan dengan kegiatan sehari-hari melainkan

juga menyangkut masalah-masalah strategis. Konsultasi tersebut tidak terbatas hanya pada pendapat dan gagasan saja. Bisa juga dengan menyediakan kotak saran. Melalui upaya ini diharapkan akan saling mengisi kekurangan masing-masing pihak.

d. Kerjasama (*collaborating*),

Kerjasama (*collaborating*) sepenuhnya antara kepala sekolah dengan guru pada hakikatnya merupakan tujuan akhir dari setiap program pemberdayaan. Hanya dengan kerjasama yang bebas dan terbuka seluruh kekayaan, kecakapan dan pengetahuan dalam organisasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sekolah. Kerjasama juga merupakan ujian akhir yang akan membuktikan tidak hanya seberapa besar kecakapan kepala sekolah dalam pemberdayaan, melainkan juga seberapa kuat kemampuan melaksanakannya secara penuh. Namun hal itu tidak berarti kepala sekolah tidak mampu memulai perubahan strategis, sebab untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya guru. Oleh karenanya, melalui kerjasama dapat membantu memastikan perubahan strategis yang dipikirkan secara lebih matang. Hal itu berarti bahwa kerjasama merupakan kecakapan yang berkembang melalui praktek.

e. Membimbing (*mentoring*),

Membimbing (*mentoring*) merupakan tahap kegiatan pemberdayaan dan sekaligus merupakan teknik manajemen.

Bertambahnya kematangan dan pengalaman akan sampai kepada kesadaran bahwa sesungguhnya guru dapat mencapai karya yang lebih optimal dan memperluas pengaruh melalui kerjasama dengan orang lain. Orang lebih suka menularkan apa yang dipelajari daripada menerapkan pengetahuan secara langsung, sehingga akan lebih optimal dari pada mengerjakannya sendiri. Proses ini disebut membimbing, yaitu bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi guru sebagai orang yang diberdayakan.

f. Mendukung (*supporting*),

Kepala sekolah yang baik mengetahui perlunya mendukung guru yang diberdayakan dan membantu mereka untuk mandiri. Pemberdayaan guru terlihat bila kepala sekolah menyadari bahwa peran utama mereka adalah memberi dukungan yang tepat.

C. Mutu Guru

1. Definisi Mutu

Secara umum mutu diartikan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Pada konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha dan siswa. *Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan

sarana sekolah. *Ketiga*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. *Keempat*, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.

Menurut Hensler dan Bruneel (dalam Stewart, 1998:26) ada empat prinsip utama mutu, diantaranya:

a. Kepuasan Pelanggan

Dalam mutu pendidikan, konsep mengenai mutu dan pelanggan diperluas. Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pendidikan hanya pelayanan jasa. Sekolah harus memberikan pelayanan jasa sebaik-baiknya kepada pelanggannya. Pelanggan sekolah meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal sekolah. Pelanggan eksternal sekolah adalah orang tua siswa, pemerintah dan masyarakat termasuk komite sekolah. Pelanggan internal sekolah adalah siswa, guru dan staf tata usaha. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk harga, keamanan dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, aktifitasnya harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pelanggan, semakin tinggi nilai yang diberikan maka makin besar pula kepuasan pelanggan.

b. Respek terhadap Setiap Orang

Dalam sekolah yang bermutu kelas dunia, setiap orang disekolah dipandang memiliki potensi. Orang yang ada diorganisasi dipandang sebagai sumber daya organisasi yang paling bernilai dan dipandang sebagai aset organisasi. Oleh karena itu, setiap orang diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk berprestasi, berkarier dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

c. Manajemen Berdasarkan Fakta

Sekolah kelas dunia berorientasi pada fakta, maksudnya setiap keputusan selalu didasarkan pada fakta, bukan pada perasaan (*feeling*) atau ingatan semata. Ada dua konsep yang berkaitan dengan hal ini: (1) prioritatisasi, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan padasemua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan menggunakan data, manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu; (2) variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi.

d. Perbaikan Terus Menerus

Agar dapat sukses setiap sekolah perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep

yang berlaku adalah langkah perencanaan, melaksanakan rencana, memeriksa hasil pelaksanaan rencana, dan melakukan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.

Stakeholder sekolah itu terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, *stakeholder* primer, yakni siswa atau pihak-pihak yang menerima jasa pendidikan secara langsung. Kedua, *stakeholder* sekunder, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap mutu jasa pendidikan, antara lain orang tua siswa, instansi atau penyandang dana/beasiswa, tenaga administratif sekolah dan sebagainya. Ketiga *stakeholder* tersier, yakni pelanggan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan jasa pendidikan, mereka memanfaatkan hasil jasa layanan, antara lain masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Stakeholder sekolah juga dapat dibedakan atas status mereka sebagai pengelola pendidikan atau bukan. Perspektif ini *stakeholder* jasa pendidikan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, *stakeholder* internal, yaitu *stakeholder* jasa pendidikan yang bersifat cenderung permanen, yaitu pengelola pendidikan. Kedua, pelanggan eksternal, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jasa layanan sekolah, tetapi bersifat *tentative*, yaitu siswa reguler dan non reguler, orang tua atau wali siswa, dunia usaha dan pemerintah.

2. Definisi Mutu Guru

Pada format pengelolaan pendidikan yang sentralistik, sekolah menjadi unit birokrasi dan tenaga pendidik (guru) sering diposisikan

sebagai karyawan birokrasi pemerintah. Sebaliknya pada format pengelolaan pendidikan yang desentralisasikan, sekolah dikonsepsikan sebagai unit akademik dan tenaga pendidik (guru) merupakan tenaga profesional. Supaya mempunyai lulusan peserta didik yang diharapkan maka sekolah harus meningkatkan mutu guru.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. *Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. *Ketiga*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja dan struktur organisasi. *Keempat*, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.

Tenaga pendidik dikatakan bermutu berdasarkan Undang-Undang Guru pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi; Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi sosial dan Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat 1).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Definisi lain tentang kompetensi adalah sebagaimana diungkapkan Richard J. Mirabile, yaitu: *competency is knowledge skill, ability or characteristic associated with high performance an a job. Some definition of competency include motives, beliefs and values.*

Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, rancangan dan pelaksanaan dan pembelajaran, evaluasi, hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan dan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kemudian dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 2 (1) bahwa: “Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam SNP pasal 28 (1) bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa: “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 (1), kompetensi guru ada 4, meliputi:

a. Kompetensi Pedagogik

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.

Menurut Slamet PH yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengatakan kompetensi pedagogik terdiri dari sub-kompetensi (1) berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan; (2) mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); (3) melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4) merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran *pro-perubahan* (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentasi, efektif dan menyenangkan); (6) menilai hasil belajar peserta didik secara otentik; (7) membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, kepribadian, bakat, minat dan karir; dan (8) mengembangkan profesionalisme sebagai guru.

b. Kompetensi Profesional

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar

Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional seorang guru sekurang-kurangnya harus memiliki penguasaan diantaranya:

- a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan
 - b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- c. Kompetensi Kepribadian

Istilah kepribadian digunakan dalam disiplin ilmu psikologi yang mempunyai pengertian sebagai “sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang”. Kata kepribadian diambil dari terjemahan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata *personality*, yang mempunyai pengertian sebagai sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain (Kartini Kartono dan Dali Gulo: 1987).

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik.

Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.

d. Kompetensi Sosial

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa standar kompetensi tenaga pendidik (guru) adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan supaya mutu guru dapat diketahui. Standar kompetensi tenaga pendidik (guru) bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 1 tertulis bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 7 ayat 1 tertulis “profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

(1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (10) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.”

Mutu guru juga dapat dinilai dari beberapa aspek seperti kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 mengatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 mengatakan bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas perlu adanya peningkatan mutu tenaga pendidik (guru) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pendidikan nasional.

Mutu sumber daya manusia sebagai tujuan dari manajemen sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi fisik, kualitas, pengetahuan, keterampilan, semangat kerja dan disiplin serta kualitas kesejahteraannya sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Menurut Taliziduhu Ndraha (2004:12), sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai kompetitif generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity* dan *imagination*, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga dan otot.

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mampu meningkatkan daya serap teknologi secara menyeluruh diperlukan persiapan yang matang dengan sebanyak mungkin menjaring manusia yang mampu mengelola kehidupan secara produktif, efisien dan berkesadaran kebangsaan yang tinggi serta berwatak sosial yang serasi, selaras dan seimbang dalam bereksistensi terhadap lingkungannya.

Menurut Collin Coulson-Thomas dalam Stewart (1998:8), bahwa mutu yang dimiliki oleh pegawai/staff dalam organisasi masa depan adalah:

- a. Mampu memberikan dorongan serta perhatian yang khusus tentang visi, sasaran tujuan organisasi yang jelas difokuskan pada pelanggan. Pemberian motivasi kepada pegawai merupakan alat pendorong yang menyebabkan seorang pegawai merasa terpanggil untuk melakukan suatu kegiatan (dalam hal ini yang dimaksud adalah dorongan/motivasi dalam arti positif yaitu untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam bekerja). Dengan memberikan dorongan/motivasi yang tepat, maka pegawai akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan-kepentingan pribadi para anggotanya agar terpelihara pula.
- b. Memiliki sikap yang sesuai dengan nilai organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan prospek pribadinya. Dalam arti upaya menuju terciptanya kualitas pegawai yang utuh, harus dilihat dari sikap pegawai karena sikap merupakan titik awal penentu dalam berpikir dan melakukan kegiatan tertentu di lingkungan kerja.
- c. Adanya komitmen secara terbuka mengenai pemberdayaan yang mengikutsertakan pegawai, adanya saling percaya dan saling

memperhatikan pengembangan jati diri dalam proses peningkatan dari melalui belajar yang terus menerus.

- d. Sikap dan mampu bekerja dan belajar dengan efektif dalam sebuah tim pada waktu yang bersamaan. Pekerjaan yang dilakukan secara efektif adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dibutuhkan kerja sama tim untuk memecahkan berbagai masalah intern organisasi.
- e. Menghadapi sikap yang baik dalam menghadapi rintangan dan cobaan yang timbul. Sikap yang baik dari pegawai yang mampu menghadapi rintangan yang timbul sangat diperlukan untuk memperoleh kesanggupan bertahan terhadap segala macam ujian, penderitaan dan tantangan baik jasmaniah dan rohaniah.

Simamora (2003:24) menjelaskan bahwa masalah sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek yaitu, kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut sumber daya manusia. Sedangkan kualitas menyangkut dua aspek pula yakni aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek nonfisik (kualitas nonfisik) yaitu yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan-keterampilan lainnya. Aspek ini sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai penunjang bila keberadaannya tidak dikembangkan sebagai suatu kekuatan yang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dari penjelasan tentang pengertian dan definisi-definisi serta pentingnya peningkatan mutu di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan untuk jaman sekarang ini sangat diperlukan peningkatan mutu sumber daya manusia untuk menunjang berbagai aspek kehidupan untuk lebih maju dan meningkatkan taraf hidup. Salah satu aspek peningkatan mutu sumber daya manusia yang paling efektif adalah dengan jalan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang didukung oleh guru yang bermutu pula.

Khusus untuk guru yang berkompeten yang bisa mengangkat SDM adalah guru yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan mutu lulusan pun akan meningkat. Selanjutnya Hamalik (2002:36) menyatakan bahwa “guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada padatingkat optimal”. Dengan begitu, mutu lulusan pun akan terangkat dan secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas SDM.

C. Partisipasi

1. Definisi Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari

kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Conyers, 1994: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Hikmat (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahandan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

Soemarmo (2005: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Hikmat (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff dalam Hikmat (2001: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumberdaya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi

dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi dalam Hikmat (2001:58), terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi dalam Hikmat (2001:58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

b. Partisipasi non fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

3. Partisipasi dalam Konteks Pendidikan Sekolah

Pada konteks pendidikan, istilah warga sekolah bukan hal asing yang jarang didengar. Hal ini dikarenakan, apabila berbicara mengenai pendidikan, maka warga sekolah menjadi subyek maupun obyek dari setiap keputusan yang diambil dalam bidang pendidikan.

Warga sekolah merupakan individu-individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. (Soemarmo, 2005: 269).

Departemen Pendidikan Nasional mengartikan partisipasi pendidikan sebagai proses warga sekolah dan masyarakat terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan di sekolah.

Partisipasi sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu. Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivasi dari sekolah dan orang tua dalam tujuan sekolah. Artinya, partisipasi tidak cukup dipahami oleh sekolah sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam peningkatan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia inter subyektif (siswa, orang tua, guru) menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu. Artinya, partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu berhasil jika ada pemahaman yang sama antar sekolah dalam menjadikan anak berprestasi (Hikmat, 2001: 193).

Kepala sekolah bersama dewan guru serta warga sekolah secara transparan dan bertanggung jawab melaksanakan visi, misi dan

program sekolah yang diamanatkan oleh masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pengawasan dan pengendalian mutu disekolah dilaksanakan secara internal, eksternal, serta transparan dengan prinsip akuntabilitas publik. Evaluasi pelaksanaan program sekolah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan secara menyeluruh. Pada waktu-waktu tertentu dilakukan penilaian input, proses, *output* dan *outcome* pendidikan serta manajemen sekolah sebagai bagian dari kegiatan akreditasi sekolah (Soemarmo, 2005: 173).

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa warga sekolah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan di sekolah.

4. Indikator Keberhasilan Partisipasi

Keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator berikut:

- a. Kontribusi/dedikasi *stakeholders* meningkat dalam hal jasa (pemikiran/keterampilan), finansial, moral dan material/barang.
- b. Meningkatnya kepercayaan *stakeholders* kepada sekolah terutama menyangkut kewibawaan dan kebersihan.
- c. Meningkatnya tanggung jawab *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan.
- e. Meningkatnya kepedulian *stakeholders* terhadap setiap langkah yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu.
- f. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar mengekspresikan apresiasi dan pendapat *stakeholders* dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan (Conyers, 1994: 25).

Menurut Mulyasa (dalam Conyers, 1994:41) indikator keberhasilan partisipasi sekolah akan membentuk: a) saling pengertian antar sekolah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat termasuk dunia kerja, b) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing, c) kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan partisipasi adalah meningkatnya saling pengertian dan saling membantu antara *stakeholders* terutama dalam setiap peningkatan mutu yang dilakukan oleh sekolah dan masyarakat.

D. Teori Regulasi

1. Pengertian Teori Regulasi

Perundang-undangan dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, dibedakan antara *legislation* dan *regulation*. *Legislation* lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (*the making of laws via legislation*). *Regulation* diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif (*rule or order having force of law issued by executive authority of government*). Farida (2007:4) menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”.

Soehino (2006:15), memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
2. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004, yang menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

Rincian jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ialah Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang memperoleh delegasi dari Undang-undang atau Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Keputusan Direktur Jenderal Departemen yang memperoleh delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Keputusan “badan” Negara yang dibentuk berdasarkan atribusi suatu Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota, atau Kepala Daerah yang memperoleh delegasi dari peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e menurut Latief (2005:78), meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur);
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
3. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Penjelasan dari Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa

“Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Undang-undang misalnya, berfungsi antara lain mengatur lebih lanjut hal yang tegas-tegas ‘diminta’ oleh

ketentuan UUD dan Ketetapan MPR. Dari semua jenis peraturan perundang-undangan, hanya undang-undang dan peraturan daerah saja yang pembentukannya memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, antara Kepala Daerah dan DPRD, lain-lainnya tidak. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan perlu diketahui terlebih dahulu materi muatan undang-undang. Secara garis besar undang-undang ialah “wadah” bagi sekumpulan materi tertentu, yang meliputi:

1. Hal-hal yang oleh Hukum Dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan TAP MPR) diminta secara tegas-tegas ataupun tidak untuk ditetapkan dengan undang-undang.
2. Hal-hal yang menurut asas yang dianut Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai Negara berdasar Atas Hukum atau *Rechtstaat* diminta untuk diatur dengan undang-undang.
3. Hal-hal yang menurut asas yang dianut Pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu Sistem Konstitusi atau *Constitutionel System* diminta untuk diatur dengan undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Dalam implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru pada Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, kejelasan masalah yang akan dibahas yaitu masalah implementasi program serta dampak-dampak yang ditimbulkan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Kemudian untuk menarik kesimpulan dapat menggunakan metode-metode deduktif dan metode induktif. Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Secara umum nantinya akan menganalisa implementasi program *blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru pada Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang ada yang diperoleh di lapangan maupun dari studi kepustakaan. Tetapi setelah dipelajari ketentuan hukumnya dan

diteliti di lapangan, diadakan analisa berjalannya program serta dampak yang ditimbulkan oleh program ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidaklah terlalu luas. Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Implementasi program *Blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru yang dapat dilihat dari kegiatan berikut ini:

a) Sosialisasi

Dalam tahap ini merupakan tahap awal dilaksanakannya suatu program. Sehingga para pelaksana program mengetahui sasaran dan tujuan dari program yang akan dilaksanakan.

b) Pengajuan Proposal

Pada tahap ini, dilakukan setelah sosialisasi selesai dilakukan. Tujuan dari pengajuan proposal ini adalah untuk membuat sebuah rancangan kegiatan dan laporan keuangan terhadap program yang akan dilaksanakan.

c) Pencairan Dana

Pada tahap ini merupakan tahap dicairkannya dana bantuan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dalam proposal. Pada

tahap ini pula pengawasan serta transparansi perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana.

d) Pelaksanaan Program Pemberdayaan *Blockgrant* Kelompok Kerja Guru (KKG)

Tahap ini merupakan tahap dari dilaksanakannya suatu kegiatan, setelah dibentuknya panitia pelaksana dan dana bantuan yang sudah dicairkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

- a) Faktor Pendukung
- b) Faktor Penghambat

C. Lokasi penelitian dan situs penelitan

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti, peneliti mengambil lokasi Kabupaten Lamongan, yaitu adalah Kelompok Kerja Guru SD Gugus 02 Kecamatan Tikung. Sedangkan situsnya adalah Kelompok Kerja Guru SD Gugus 02 Kecamatan Tikung, Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Lamongan karena adanya kesenjangan waktu yang diterapkan pada daerah terkait program tersebut karena berjalannya program sejak tahun 2007 dan baru tahun 2010 program tersebut dapat berjalan di Kabupaten Lamongan.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang cukup lengkap dan relevan dengan pokok masalah yang dibahas, maka cara yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh setelah mengadakan suatu penelitian lapangan yaitu langsung ke obyek yang menjadi pokok permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini diartikan sebagai data yang diperoleh dari data yang tidak diamati langsung oleh penulis di lapangan. Untuk memperoleh data sekunder ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil pendapat-pendapat atau tulisan tulisan para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk data-data atau naskah-naskah resmi yang ada. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendukung data yang diperoleh dari data primer dan dimaksudkan sebagai landasan teoritisnya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 30 sampai dengan Pasal 44.
 - b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d) Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
- a. Buku-buku dan literatur lain mengenai implementasi kebijakan.
 - b. Buku-buku dan literatur lain mengenai program *blockgrant* KKG.
 - c. Hasil karya ilmiah dari kalangan implementasi kebijakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer ini, penulis menggunakan metode:

1. Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

- (a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
 - (b) Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung.
 - (c) Ketua KKG Gugus 02 Kecamatan Tikung.
 - (d) Narasumber Pelatihan *Blockgrant* KKG.
 - (e) Peserta Pelatihan *Blockgrant* KKG.
 - (f) Panitia Pelaksana *Blockgrant* KKG.
2. Observasi

Secara metodologis penggunaan pengamatan ialah peneliti mengoptimalkan kemampuan dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan (observasi) memungkinkan peneliti untuk menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subjek pada keadaan waktu itu. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi pada peserta *blockgrant* KKG SD Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

3. Dokumentasi

Dokumen yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan pencatatan langsung mengenai data yang berupa dokumen ataupun mengutip keterangan-keterangan yang dibutuhkan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ataupun keterangan yang ada pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung.

F. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, agar data yang dihasilkan dapat dibaca maka perlu menggunakan suatu metode analisis data. Analisis data yang dimaksud adalah untuk dapat memberikan makna yang berguna, dalam mencapai suatu kesimpulan guna memecahkan masalah penelitian. “Analisis data adalah proses mengkoordinasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja” (Idrus, 2009:45). Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain yang dikemukakan oleh James Spradley. Analisis domain adalah suatu kategori pengertian budaya yang memasukkan kategori-kategori yang lebih kecil lainnya. Dalam pelaksanaan program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) ini, analisis ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dari pemberian dana bantuan *blockgrant* ini dalam rangka meningkatkan mutu guru. Fokus pengamatan dalam model ini terdapat tiga komponen yaitu ruang (tempat), aktor (pelaku) dan aktivitas (kegiatan). Dalam analisis domain terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. *Cover term*, yaitu istilah atau perilaku terselubung yang melekat pada subjek penelitian.
- b. *Included term*, yaitu nama untuk seluruh kategori kecil yang telah tercakup dalam domain.
- c. *Semantic relationship*, yaitu penghubung antara *cover term* dan *included term*.

Langkah-langkah dalam analisis domain ini adalah sebagai berikut:

1. Memilih salah satu hubungan semantik.
2. Menyiapkan lembar analisis domain pertama.
3. Memilih satu sampel catatan lapangan dari catatan lapangan yang dibuat terakhir. Memulai dengan satu catatan lapangan kemudian berpindah pada catatan lapangan berikutnya.
4. Mencari kemungkinan *cover term* dan *included term* yang sesuai dengan hubungan semantik dari sampel catatan lapangan dan tuliskan domain-domain yang ditemukan pada lembar analisis domain yang kedua.
5. Mengulangi usaha pencarian domain menggunakan seluruh hubungan semantik lainnya. Melanjutkan sampai diperoleh domain-domain yang diidentifikasi.
6. Membuat daftar domain yang ditemukan. Daftar tersebut merupakan ringkasan kategori budaya yang diidentifikasi dari sampel catatan lapangan dan menggambarkan secara umum pemandangan budaya yang diteliti.

Setelah mendapatkan data mengenai pelaksanaan program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dari analisis domain di atas, peneliti akan melakukan analisis data. Dan pada tahap terakhir akan menarik kesimpulan sebagai interpretasi akhir peneliti dalam melakukan penelitian pelaksanaan program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan adalah kabupaten yang terdiri dari hamparan daratan, pegunungan kapur, lautan, sungai dan rawa-rawa, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 km² setara 181.280 Ha atau \pm 3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km. Wilayah Kabupaten Lamongan terletak di antara 112°4'41" sampai dengan 112°35'45" bujur timur dan antara 6°51'54" sampai dengan 7°23'6" lintang selatan.

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada bentangan daratan dan sebagian laut dan sungai yang lebih dikenal dengan daerah yang karakteristiknya adalah daerah rawan banjir. Di bagian utara wilayah Kabupaten Lamongan berbatasan langsung dengan pantai Laut Jawa. Di sepanjang pantai itu terletak dua wilayah kecamatan yaitu Brondong dan Paciran dengan total panjang garis pantai kurang lebih 35 km dengan sebagian besar penduduknya sebagai nelayan. Di Pantai Utara Lamongan ini telah direkayasa menjadi tempat wisata yang terkenal yakni Wisata Bahari Lamongan atau WBL. Di sepanjang pantai utara Kabupaten Lamongan ini juga terbentang jalan sepanjang pantai utara yang secara historis yang dikenal sebagai jalan hasil kerja rodi atau Jalan

Deandeles. Sisi-sisi lain dari wilayah Kabupaten Lamongan berbatasan dengan wilayah daerah kabupaten lain, antara lain, di sebelah timur berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Gresik yang terbentang dari arah yang paling utara sampai dengan yang paling selatan. Sementara di sebelah selatan Kabupaten Lamongan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di bagian tenggara dan Kabupaten Jombang di sepanjang selatan dan yang di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dari arah selatan ke utara sampai dengan sungai Bengawan Solo dan di barat daya berbatasan dengan Kabupaten Tuban.

Dalam bidang pendidikan, kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Lamongan memiliki indikasi yang sama dengan penilaian kinerja pendidikan di Indonesia pada umumnya dapat dipandang dari sudut pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dan lebih lanjut dapat dijelaskan sebagaimana profil pendidikan Kota Lamongan 2010/2011. Kondisi pemerataan dan pendidikan di Kota Lamongan diindikasikan berdasarkan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan.

Tabel 4.1
Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Pendidikan Yang Ditamatkan, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Dan Angka Melanjutkan

URAIAN	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK /MA
Angka Partisipasi Kasar	113,98	125,81	87,35
Angka Partisipasi Murni	99,94	90,02	60,46
Angka Pendidikan yang ditamatkan	18,60%	43,10%	24,73%
Angka Putus Sekolah	0,01	0,07	0,50
Angka Kelulusan	100,00%	100,00%	99,98%
Angka Melanjutkan	99,96	91,97	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

Indeks pendidikan di Kabupaten Lamongan tahun 2011 juga mengalami kenaikan yakni dari 74,11 pada tahun 2010 menjadi 81,57 pada tahun 2011. Dapat digambarkan bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Lamongan dari waktu ke waktu terus meningkat. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan presentase jumlah penduduk baik yang masih sekolah

ataupun tidak sekolah lagi menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di Lamongan dan juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja.

Angka Putus Sekolah (APS) mencerminkan anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Faktor penyebab utama putus sekolah diantaranya adalah kondisi ekonomi dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Angka Kelulusan (AL) adalah presentase jumlah lulusan pada jejang tertentu dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu pada tahun ajaran sebelumnya. Semakin tinggi AL maka semakin baik dan idealnya sama dengan 100%. Hal ini berarti semua siswa berhasil lulus dari jenjang pendidikan tersebut. Angka Melanjutkan (AM) adalah presentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Makin tinggi AM maka semakin baik dan idealnya sama dengan 100%. Hal ini berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sebagaimana diamanatkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2): “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dengan demikian pemerintah wajib menyiapkan segala prasarana dan sarana, namun hambatannya adalah kondisi prasarana gedung SDN di Kabupaten

Lamongan kurang baik. Dari 616 gedung SD yang kondisinya baik 2.231 ruang kelas. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan di Kabupaten Lamongan terlihat pada kondisi gedung sekolah dalam kondisi baik dari tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dan untuk lebih lanjut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2
Fasilitas Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN	
		2010	2011
1.	Gedung SD/MI Kondisi Baik	2.008	2.231
2.	Gedung SMP/MTs Kondisi Baik	1.676	1.621
3.	Gedung SMA/SMK/MA Kondisi Baik	1.242	1.377

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

Tabel 4.3
**Rasio Murid/Guru Untuk Jenjang Pendidikan Dari Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah, SMP/MTs, SMA/SMK/MA**

URAIAN	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
Rasio Murid/Guru	9	8	8
Rasio Murid/sekolah	103	189	258
Rasio Murid/Kelas	16	30	32
Rasio Kelas/Guru	0,51	0,26	0.25
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	0,011	0,01	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio Murid/Guru untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA menunjukkan bahwa ketersediaan guru di Kabupaten Lamongan sudah cukup baik karena 1 orang guru berbanding dengan sekitar 8-11 orang murid. Rasio Murid/Sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI paling kecil pada tahun 2011 sebesar 103. SMP/MTs rasio murid/sekolah paling kecil dimana satu sekolah mempunyai 189 orang murid pada tahun 2011. Sedangkan rasio yang tertinggi pada tahun 2010 terdapat pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dimana satu sekolah mempunyai 268 orang murid. Rasio Murid/Kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI yang paling kecil dimana satu kelas mempunyai 16 orang murid pada tahun 2008, 2010 dan 2011. Sedangkan rasio tertinggi pada tahun 2006 dan 2008 terdapat pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dimana terdapat 36 orang murid dalam satu kelas. Rasio Murid/Guru menjelaskan bahwa rata-rata pada jenjang tingkat pendidikan untuk setiap ruang kelas terhadap ketersediaan tenaga pengajar lebih dari 2 guru. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar terhadap jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

2. Kecamatan Tikung

Kecamatan Tikung merupakan satu diantara 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yang terletak di sebelah selatan dari ibukota Kabupaten Lamongan dengan jarak ± 7 km ke arah jurusan ke Kabupaten Mojokerto. Dengan letak geografis di belahan selatan

berbatasan dengan Kecamatan Mantup dan Balongpanggung (Kabupaten Gresik), sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kembangbahu, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sarirejo dan yang di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lamongan.

Luas wilayah Kecamatan Tikung ± 52,99 km². Dengan jumlah penduduk sampai dengan Bulan Desember 2012 ± 41.483 jiwa yang terdiri darilaki-laki sejumlah 20.511 jiwa dan perempuan sejumlah 20.972 jiwa. Secara administratif wilayah Kecamatan Tikung terbagi menjadi 13 desa, 68 dusun, 80 Rukun Warga (RW) dan 246 Rukun Tetangga (RT). Pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Tikung dengan data pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Lembaga Pendidikan SD/MI Kecamatan Tikung

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Sekolah Dasar Negeri	27	27	27
2	Sekolah Dasar Swasta	-	-	-
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	-	-	-
4	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	11	11	11
	JUMLAH	38	38	38

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 2011

Perkembangan anak usia sekolah 7–12 tahun yang ada dan bersekolah pada pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Tikung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Data Perkembangan Siswa SD/MI Kecamatan Tikung

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Sekolah Dasar Negeri	2786	2644	2552
2	Sekolah Dasar Swasta	-	-	-
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri			
4	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	612	620	635
	JUMLAH	3398	3264	3187

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 2011

Dalam peningkatan mutu dan profesionalitas pendidik di Kecamatan Tikung dan Kabupaten Lamongan pada umumnya dapat dilaksanakan melalui Sistem Pembinaan Profesional (SPP) dalam wadah Gugus Sekolah. Gugus sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Tikung dibagi sesuai dengan aturan Dirjen Dikdasmen yaitu sekolah-sekolah yang berdekatan dan memiliki karakteristik yang sama dapat bergabung dalam Gugus Sekolah yang terdiri dari 5 sampai dengan 8 lembaga Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta.

Tabel 4.6
Sistem Pembinaan Profesional Gugus Sekolah Dasar di Kecamatan Tikung

NO	GUGUS SEKOLAH DASAR	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	Gugus Sekolah Dasar 01	6	6	6
2	Gugus Sekolah Dasar 02	7	7	7
3	Gugus Sekolah Dasar 03	7	7	7
4	Gugus Sekolah Dasar 04	7	7	7
	JUMLAH	27	27	27

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 2011

B. Gambaran Umum Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1. Sejarah Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya bab II pasal 2 mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain rendahnya mutu pendidikan nasional telah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia pada bursa tenaga kerja pada era global. Masalah ini menjadi pemikiran segenap jajaran pendidikan. Sementara dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan arus informasi yang sangat tinggi sangat mempengaruhi gaya hidup dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Sementara banyak pelaku pendidikan yang kurang mampu mengimbangi laju perkembangan dan perubahan ilmu dan teknologi yang sekaligus terjadi perubahan dan tuntutan masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa intensitas dan kebermaknaan forum-forum KKG, MGMP, KKKS dan MKKS selama ini masih kurang optimal sebagai organisasi pembinaan profesional dalam Sistem Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang secara terus menerus menyelaraskan antara

tuntutan masyarakat dan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPPMP) Kemendiknas kemudian berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, salah satunya dengan merevitalisasi Kelompok Kegiatan Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan dana *blockgrant* untuk membantu guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran seni budaya dan ketrampilan serta manajemen.

2. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 30 sampai dengan Pasal 44.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tentang Guru.

- e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompensasi Konselor.
- h) Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- j) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- k) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

3. Tujuan

Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang ditujukan untuk pelatihan penilaian kinerja guru ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru/kepala

sekolah/pengawas sekolah melalui pemberdayaan kapasitas kelompok/musyawarah kerja Guru, Kepala Sekolah dalam melaksanakan kegiatan PK Guru dan mampu:

- a) Memahami tentang mekanisme dan prosedur penilaian kinerja guru (PK Guru).
- b) Memahami tentang mekanisme dan prosedur pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
- c) Memahami isi dokumen yang terkait dengan penilaian kerja guru.
- d) Mampu mengidentifikasi aktifitas guru yang signifikan terkait dengan kinerjanya.
- e) Mampu menerjemahkan hasil pengamatan kinerja guru ke dalam bentuk angka berdasarkan kriteria/indikator tiap kompetensi.
- f) Dapat mengamati kinerja guru dan berdasarkan hasil pengamatan serta pemantauan dapat memberikan rekomendasi/saran perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- g) Mampu memberikan rekomendasi sumber-sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dalam peningkatan kompetensinya.
- h) Dapat mentransfer secara efektif pemahaman tentang mekanisme dan prosedur penilaian kerja guru (PK Guru) dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) kepada penilai kinerja guru.
- i) Dapat melakukan penilaian kinerja guru secara efektif mengetahui permasalahan umum yang dihadapi guru dan mampu memberikan solusi dalam penyelesaiannya.

4. Sasaran

Sasaran Kegiatan pelatihan calon penilai kinerja guru adalah anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) Guru SD Gugus 02 Kecamatan Tikung. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Lamongan karena adanya kesenjangan waktu yang diterapkan pada daerah terkait program tersebut karena berjalannya program sejak tahun 2007 dan baru tahun 2010 program tersebut dapat berjalan di Kabupaten Lamongan.

5. Hasil Yang Diharapkan

Diharapkan setelah melaksanakan kegiatan pelatihan peserta anggota kelompok/musyawarah kerja dapat:

- a) Memahami berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan profesionalitas guru.
- b) Memahami tentang mekanisme dan prosedur penilaian kinerja guru (PK Guru).
- c) Memahami tentang mekanisme dan prosedur pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
- d) Memahami isi dokumen yang terkait dengan penilaian kinerja guru.
- e) Mampu mengidentifikasi aktifitas guru yang signifikan terkait dengan kinerjanya.
- f) Dapat mengamati kinerja guru dan berdasarkan atas hasil pengamatan dapat digunakan oleh guru dalam peningkatan kompetensinya.
- g) Mampu menterjemahkan hasil pengamatan kinerja guru ke dalam angka berdasarkan kriteria/indikator tiap kompetensi.

- h) Dapat melakukan penilaian kinerja guru secara objektif, jujur dan efektif.

C. Penyajian Data

1. Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru

Program *Blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan mutu guru. Bantuan ini dalam bentuk dana yang diberikan oleh pemerintah untuk keperluan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Bantuan *Blockgrant* Kelompok Kerja Guru (KKG) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kinerja di dalam melaksanakan penilaian kinerja guru. Pelaksanaan program *Blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung meliputi:

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahap awal dari pelaksanaan program *blockgrant* ini. Dengan adanya sosialisasi, para guru dapat diberi pengetahuan mengenai tujuan program ini. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan pada tahun 2011 telah mensosialisasikan adanya bantuan *blockgrant* kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Lamongan. Sosialisasi tersebut hanya diberikan

pada guru yang ditunjuk oleh Dinas Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kinerjanya, diantaranya Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, selaku ketua KKG gugus 02 Kecamatan Tikung tentang adanya bantuan *blockgrant* untuk meningkatkan mutu guru ditahun 2011 lalu, yaitu:

“Untuk pelaksanaan program *blockgrant* 2011 ini mbak, memang sosialisasi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan untuk menunjang para pelaksana program mengetahui dengan benar tujuan dari program ini. Pada saat ada bantuan tersebut, Ketua KKG gugus 02 mendapat undangan dari diknas. Undangan tersebut adalah sosialisasi yang menjelaskan tentang adanya bantuan *blockgrant* dari pemerintah pusat yang berupa program peningkatan mutu guru sekolah dasar, untuk selanjutnya Ketua KKG yang telah ditunjuk untuk kemudian mendata guru-guru yang ingin mendapatkan pelatihan peningkatan mutu pendidikan. Sehingga pada tahap ini, sosialisasi program juga diikuti dengan adanya seleksi peserta” (wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 28 Februari 2014 pukul 10.00 WIB).

Selain itu, pentingnya diadakan sosialisasi ini, juga disampaikan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung di bawah ini:

“Memang benar mbak, sosialisasi disini memiliki peran penting demi kelancaran suatu program. Untuk program *blockgrant* ini, sosialisasi dilakukan dari level atas ke bawah. Yaitu dimulai dari kabupaten sampai ke kecamatan. Nah, dari kecamatan ini, nantinya sosialisasi ditujukan kepada peserta pelatihan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya *gaps* antara aturan tertulis dari pelaksanaan program dengan kondisi nyatanya di

lapangan” (wawancara dengan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 20 Februari 2014 pukul 09.30 WIB).

Dengan adanya sosialisasi ini, para peserta program *blockgrant* ini bisa mengetahui prospek ke depan dari dijalankannya pemberian bantuan untuk meningkatkan kualitas mereka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu peserta program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG):

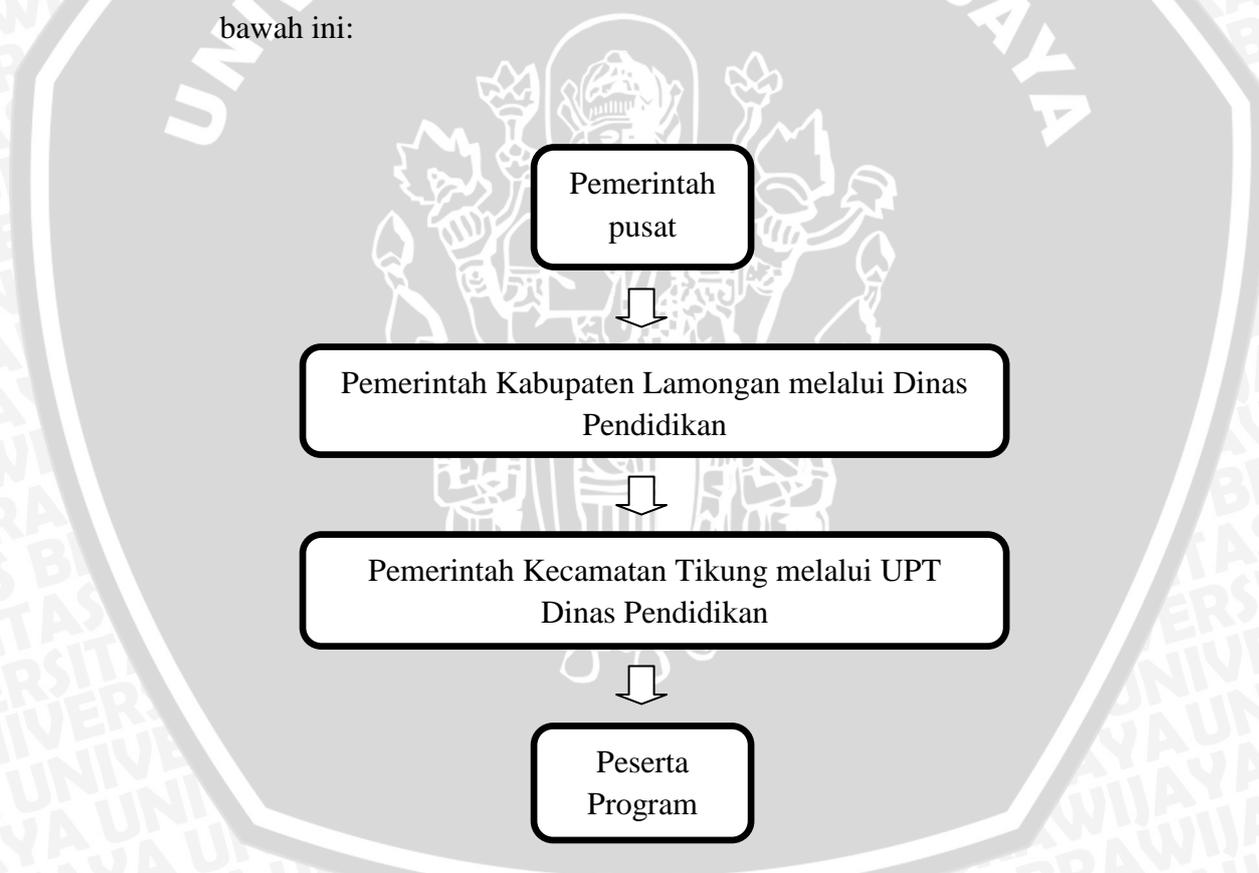
“Menurut saya mbak, sosialisasi ini sangat berguna sekali bagi kami selaku guru. Hal ini dikarenakan, dengan adanya sosialisasi kita tahu seluk beluk dari program tersebut. Selain itu, kita sebagai objek dari pelaksanaan program tersebut nantinya dapat melaksanakan atau memanfaatkan bantuan dana dengan sebaik-baiknya. Sosialisasi ini juga menandakan adanya transparansi mengenai implementasi suatu program. Jadi, tidak secara tiba-tiba ada program baru dan kita harus melaksanakannya tanpa mengetahui tujuan dari program itu sebelumnya” (wawancara dengan salah satu peserta Program *Blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 20 Februari 2014 pukul 11.00 WIB).

Mengenai penyampaian program tersebut diungkapkan pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan sebagai berikut:

“Sosialisasi tentang *blockgrant* dan landasan pelaksanaannya telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada sosialisasi yang diberikan kepada seluruh KKG yang ditunjuk untuk mendapatkan bantuan *blockgrant*, termasuk guru-guru di KKG gugus 02 Kecamatan Tikung. Pada sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai adanya bantuan *blockgrant* yang merupakan bantuan dalam bentuk dana yang diberikan pemerintah untuk keperluan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Pemberian bantuan *blockgrant* bertujuan mewujudkan perluasan dan pemerataan

pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, mendorong sekolah untuk melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dan memotivasi melanjutkan upaya pembaharuan pendidikan. Dan kemudian dari sosialisasi tersebut saya sampaikan kepada seluruh KKG yang menerima *blockgrant*" (wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 20 Februari 2014 pukul 11.30 WIB).

Untuk mempermudah memahami alur sosialisasi pada program pemberian bantuan *blockgrant* ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 4.1 Proses Sosialisasi Pogram *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan tahapan awal dari pelaksanaan suatu program. Dengan adanya sosialisasi program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) maka peserta program mengetahui tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka. Untuk sosialisasi dalam program ini dimulai dari pemerintah pusat sebagai aktor yang membuat program, kemudian Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan untuk memberikan sosialisasi sekaligus penyeleksian peserta program. Selanjutnya, sosialisasi diberikan kepada Pemerintah Kecamatan Tikung yang kemudian membuat perencanaan pelaksanaan program.

b. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal ini merupakan tahap setelah sosialisasi program telah dilakukan. Pengajuan proposal ini juga digunakan untuk melatih para kader membuat rencana kerja dan laporan pelaksanaan program atas dana yang akan dicairkan. Pengajuan proposal dilakukan oleh ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung sebagai pihak yang mengetahui kondisi pendidikan di wilayahnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut:

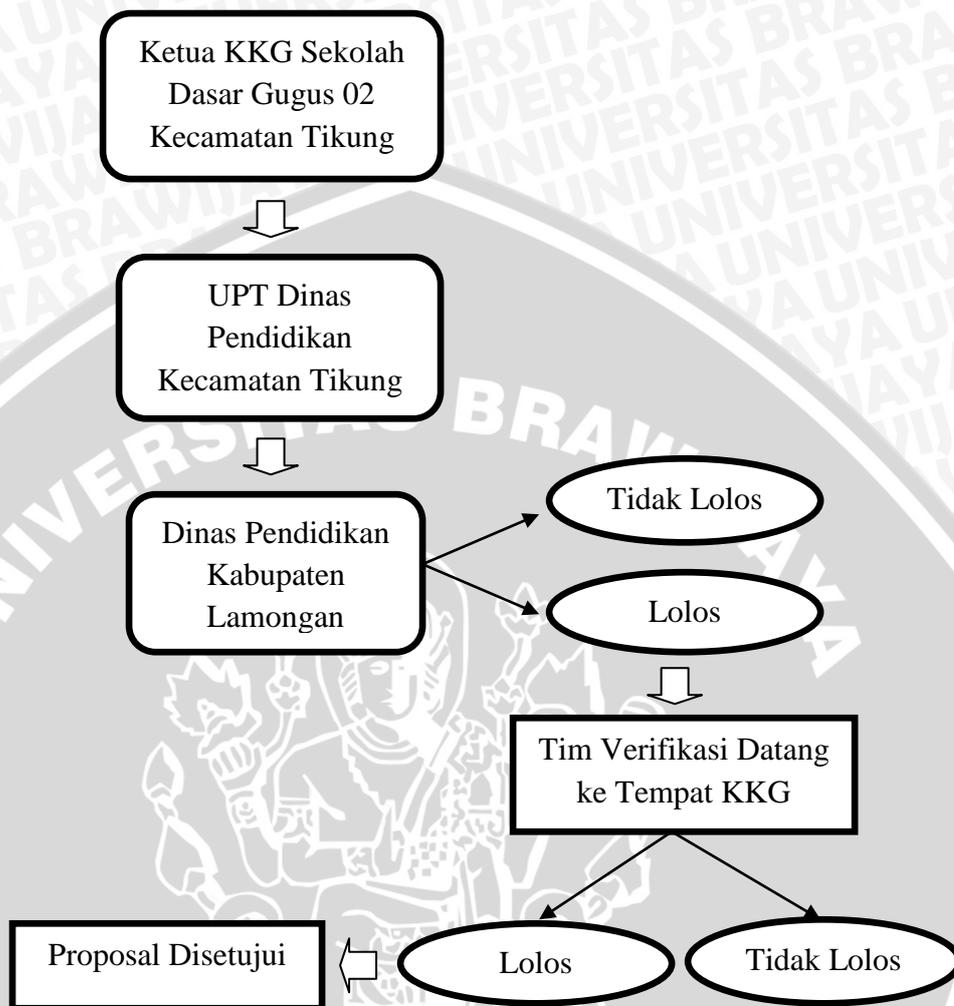
“Setelah sosialisasi dilakukan mbak, kita kemudian harus mengajukan semacam proposal mengenai rencana program yang akan dilakukan. Proposal yang sudah disusun lalu diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Setelah

proposai disetujui, lalu tim Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memverifikasi ke Kelompok Kerja Guru (KKG) yang mengajukan. Selanjutnya, apabila verifikasi juga sudah disetujui baru dana di transfer ke rekening Kelompok Kerja Guru (KKG). Untuk tahun anggaran 2011, kita mengajukan proposai pengajuan dana sebesar lima belas juta rupiah sesuai dengan kebutuhan pelatihan mbak” (wawancara dengan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 22 Februari 2014 pukul 10.00 WIB).

Selain itu, mengenai proses pengajuan proposai juga dikatakan oleh Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung di bawah ini:

“Dalam melaksanakan program *blockgrant* ini, memang kita harus mengajukan proposai dulu mbak, sesuai dengan keputusan pusat. Sehingga dalam proses ini, kita juga dilatih untuk merencanakan program yang nantinya akan bermanfaat bagi kita sendiri. Ya, semacam pemberdayaan juga mbak. Karena selain kita nantinya mendapatkan pelatihan, juga diberikan pengetahuan lainnya seperti manajemen keuangan dan pembuatan laporan kegiatan” (Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 23 Februari 2014 pukul 10.30 WIB).

Dalam hal pengajuan proposai program *blockgrant* ini, alur kegiatan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 4.2 Pengajuan Proposal KKG Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengajuan proposal ini, Ketua KKG Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung sebagai pihak yang mengajukan proposal. Setelah itu, proposal diberikan pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten Lamongan. Apabila proposal disetujui, kemudian tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan akan memverifikasi kondisi lapangan KKG yang mengajukan proposal. Selanjutnya apabila semua proposal sudah lengkap dan sesuai dengan data di lapangan, maka proposal dinilai layak untuk mendapatkan bantuan *blockgrant*. Pada tahap ini pula, para objek dari diimplementasikan program juga mendapat pengetahuan mengenai cara menyusun rencana program dan membuat laporan keuangan, yang tentunya juga disesuaikan oleh aturan dari pusat.

c. Pencairan Dana

Blockgrant yang diberikan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) didasarkan pada alokasi dana yang ditetapkan setiap tahun dan jumlah penerima *blockgrant* didasarkan pada kuota yang ditetapkan. Dana *blockgrant* diberikan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) secara kompetitif melalui seleksi. Dana ini merupakan bantuan sementara untuk membiayai sebagian program atau kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, Kelompok Kerja Guru (KKG) masih perlu didukung oleh sumber pendanaan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan kinerja anggota kelompok. *Blockgrant* diberikan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) yang memiliki program terkait dengan pelatihan penilaian kinerja guru yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bantuan dana ini diberikan secara terbuka kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi. Kelompok Kerja Guru (KKG) yang berhak menerima bantuan harus memenuhi persyaratan/kriteria ini:

- 1) Mempunyai struktur organisasi kepengurusan yang disahkan oleh dinas pendidikan kecamatan/kabupaten/kota/provinsi atau lembaga berwenang lainnya;
- 2) Kepengurusan organisasi harus memperhatikan/kepedulian terhadap gender yang merupakan kombinasi antara ketua, bendahara, dan sekretaris dengan jumlah proporsional sesuai dengan kondisi di daerah;
- 3) Masih aktif melaksanakan kegiatan setidaknya dalam satu tahun terakhir ditunjukkan dengan adanya lampiran daftar hadir secara berkala, jadwal kegiatan, laporan dan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan;
- 4) Mempunyai rekening yang masih aktif pada Bank Pemerintah atas nama KKG (bukan atas nama pribadi);
- 5) Memiliki nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KKG;
- 6) Memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel dibuktikan dengan menyerahkan contoh kegiatan dan keuangan.

Sebelumnya penerima *Blockgrant* harus mengajukan proposal untuk melaksanakan kegiatan ini. Dalam pelaksanaannya juga di awasi langsung oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan

Nasional dan pemantauan/evaluasi pelaksanaan program dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional. Pemantauan/evaluasi pelaksanaan program ini dilakukan dengan membuat laporan untuk mengetahui apakah bantuan telah tepat sasaran atau belum. Dan setelah workshop ini panitia juga harus melaporkan kegiatan ini, berikut wawancara dengan Ketua Workshop Bapak Kadis:

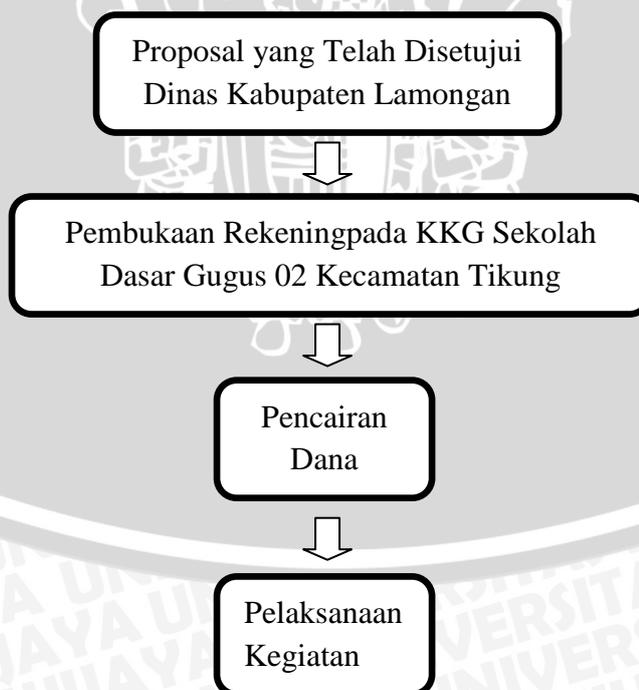
“Kami selaku panitia harus melaporkan kegiatan yang dilakukan selama Workshop dalam bentuk proposal dan mekanisme pelaporan proposal kegiatan dilakukan secara berjenjang kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional. Laporan-laporan yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kemudian dilaporkan kepada Direktorat Jenderal dengan tembusan kepala Dinas Pendidikan Propinsi setempat” (Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 24 Februari 2014 pukul 10.00 WIB).

Dana *Blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam penilaian kinerja guru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada DIPA LPMP Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Dana bantuan ini diperuntukan membiayai komponen pengeluaran sebagai berikut: Uang harian (honor) narasumber; Transport lokal narasumber dan peserta; bahan pelatihan; ATK pelatihan dan konsumsi pelatihan; pajak. Ketentuan besarnya pengeluaran dana untuk setiap komponen pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan/aturan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, bahwa penyampaian kebijakan tentang *blockgrant* telah dilakukan oleh pemerintah dengan fasilitator adalah Dinas Pendidikan Kab. Lamongan. Hal tersebut disampaikan sebagaimana berikut:

“Mengenai pelaksanaan kegiatan tentang pemberian bantuan *blockgrant*, kami telah mensosialisasikan adanya bantuan *blockgrant* kepada seluruh ketua KKG yang akan menerima *blockgrant* peningkatan mutu” (wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 25 Februari 2014 pukul 10.00 WIB).

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai alur pencairan dana *blockgrant* ini, dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Gambar 4.3 Alur Pencairan Dana *Blockgrant*

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

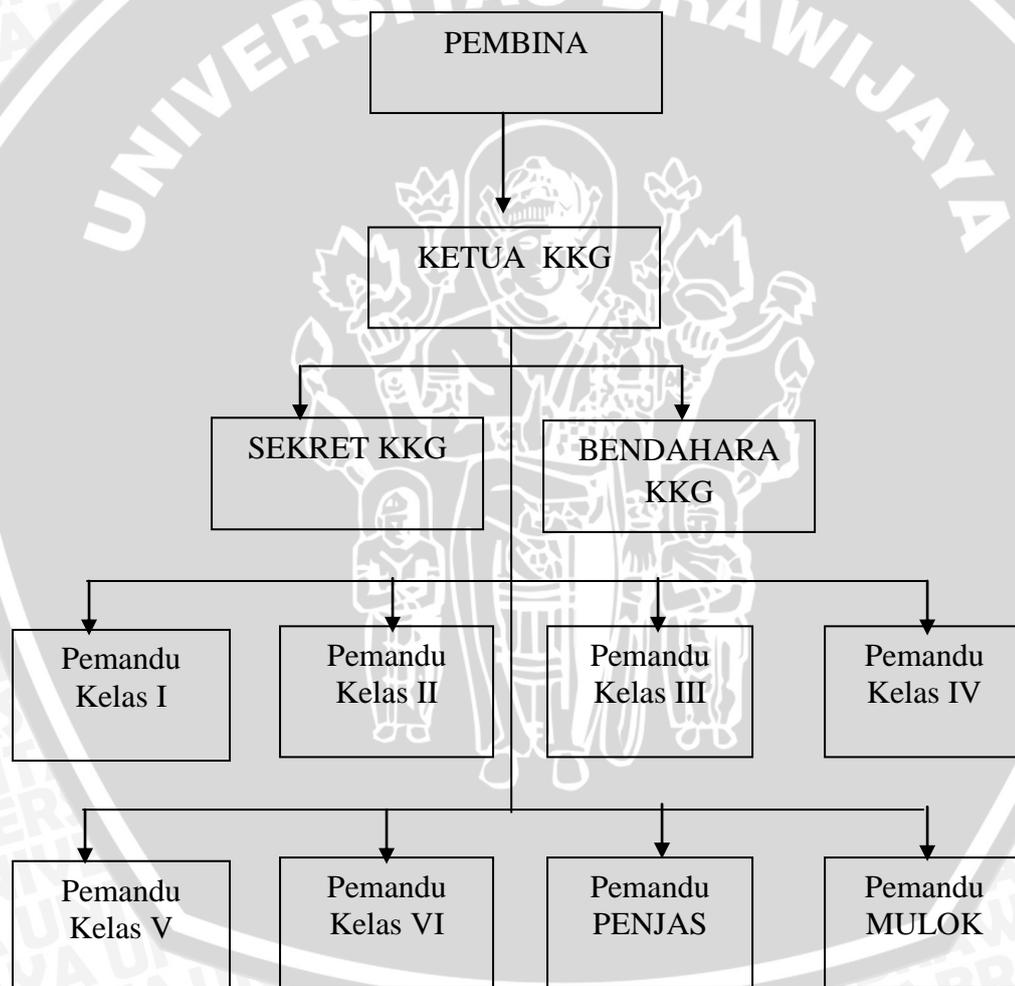
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pencairan dana *blockgrant* dilakukan setelah proposal yang diajukan oleh ketua KKG disetujui. Setelah itu, dilakukan pembukaan rekening yang disertai dengan penandatanganan perjanjian mengenai pelaksanaan dan jumlah dana yang dikeluarkan untuk program ini. Penandatanganan ini ditujukan agar terdapat transparansi dan pertanggungjawaban dari semua aktor yang terlibat. Selanjutnya dana yang dikeluarkan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu guru.

d. Pelaksanaan Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan. Dikeluarkannya PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai bentuk upaya ke arah peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan pada intinya adalah peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk itu perlu diawali dengan meningkatkan profesionalitas guru. Pemerintah melalui Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) berkonsentrasi meningkatkan kualitas guru dengan memfokuskan pada wadah profesi guru Kelompok Kerja Guru (KKG).

Jika implementasi program ingin berjalan efektif maka pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Implementasi program yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan

yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan program tersebut. Oleh karena itu dari pelatihan PKG, guru-guru harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana fungsi pelatihan itu. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada pada gugus sekolah:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KKG dalam Gugus Sekolah

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 2011

Penggunaan Blockgrant KKG/MGMP

Blockgrant digunakan antara lain untuk kegiatan–kegiatan berikut:

1. Peningkatan kemampuan guru untuk pengembangan kurikulum/KTSP, pengembangan silabus, penyusunan RPP dan pengembangan evaluasi sumber belajar;
2. Pengembangan kompetensi guru untuk menguasai materi ajar;
3. Peningkatan kemampuan guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan serta pemanfaatan teknologi informasi;
4. Pengembangan kompetensi guru dalam publikasi ilmiah, karya inovatif dan pengembangan teknologi tepat guna;
5. Pemberian kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik;
6. Peningkatan kemampuan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa pada bidang tugas yang diampu;
7. Peningkatan kinerja guru melalui pengintegrasian kegiatan penilaian kinerja, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya;
8. Peningkatan kemampuan guru untuk mengembangkan program-program yang menumbuhkan lingkungan belajar dan budaya mutu.

Sebagai implementasi program *Blockgrant* telah dilaksanakan sesuai dengan langkah–langkah kegiatan dalam proposal pengajuan dana proyek *Blockgrant* itu sendiri, sebagai berikut:

(a) **Jadwal Pelatihan**

Tabel 4.7
Jadwal Pelatihan/Workshop *Blockgrant*
Guru SD Negeri se Gugus 2 Kecamatan Tikung

NO	HARI TANGGAL	PUKUL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Senin 19 Desember 2011	07.30-08.30	Presentasi Peserta	Panitia
		08.30-09.30	Pembukaan di lanjutkan Kebijakan Pemerintah	Dinas Pendidikan Kab. Lamongan
		09.30-10.00	Cafe Break	Panitia
		10.00-12.00	Pend. Budaya Karakter Bangsa	Khusnul Khotimah, S.Pd
		12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00-14.30	Program Induksi Guru Pemula	Drs.H.Anas Thohir Ubbet, M.Pd
		14.30-15.00	Cafe Break	Panitia
		15.00-16.00	Latihan dan tugas- tugas Mandiri	Drs.H.Anas Thohir Ubbet, M.Pd
2.	Selasa 20 Desember 2011	07.30-08.30	Presentasi peserta	Panitia
		08.30-09.30	Penilaian kinerja Guru	Dra. Suhartini, M.Pd (LPMP)
		09.30-10.00	Cafe Break	Panitia
		10.00-12.00	Penilaian Kinerja Guru	Dra. Suhartini, M.Pd (LPMP)
		12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00-14.30	Mekanisme Kinerja Guru	Dra. Suhartini, M.Pd (LPMP)
		14.30-15.00	Cafe Break	Panitia
		15.00-16.00	Latihan dan tugas- tugas Mandiri	Dra. Suhartini, M.Pd (LPMP)
3.	Rabu 21 Desember 2011	07.30-08.30	Presentasi peserta	Panitia
		08.30-09.30	Pengembangan Keprofesian	Drs.H.M.Ali Mahmudi, M.Pd
		09.30-10.00	Cafe Break	Panitia
		10.00-12.00	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Drs.H.M.Ali Mahmudi, M.Pd
		12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00-15.00	Latihan dan tugas- tugas Mandiri/	Drs.H.M.Ali Mahmudi, M.Pd

		Penunjang Ujian	
	15.00-16.00	Penutup	UPT Dinas Pendidikan Kec. Tikung

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

(b) Pengarah, Narasumber, Peserta dan Panitia

1. Pengarah

Pengarah untuk kegiatan calon penilai PK Guru sebanyak 1 orang yaitu Hj. SULTIANAH S.Pd M.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung.

2. Narasumber

Narasumber untuk kegiatan pelatihan calon penilai PK Guru adalah unsur Dinas Pendidikan terdiri atas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Widyaiswara LPMP Provinsi Jawa Timur yang telah lulus Training of Trainer (ToT) Provincial Cora Team (PCT) dan Distric Core Team (DCT) PK Guru yaitu:

Tabel 4.8

Jadwal Penyaji materi/Narasumber Workshop Blockgrant Guru SD Negeri se Gugus 2 Kecamatan Tikung

NO	NAMA	UNIT KERJA	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1.	Dra. Suhartini, M.Pd	LPMP Jawa Timur	Penilaian Kinerja Guru
2.	Drs. H.M. Ali Mahmudi, M.Pd	UPT Dinas Kec. Tikung	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
3.	Drs. H. Anas Thohir Ubbet, M.Pd	UPT Dinas Kec. Tikung	Program Induksi Guru Pemula

4.	Khusnul Khotimah, S.Pd	UPT Dinas Kec. Tikung	Pend. Budaya Karakter Bangsa
----	------------------------	--------------------------	---------------------------------

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 2011

3. Peserta

Peserta pelatihan calon PK Guru adalah Guru yang terdaftar sebagai anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) sebanyak 76 orang dengan daftar nama:

Tabel 4.9
Daftar Peserta Pelatihan/Workshop *Blockgrant*
Guru SD Negeri se Gugus 2 Kecamatan Tikung

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	KET
1.	UMU ZUHRO, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	
2.	SUPRIJATI, A.Ma.Pd	SDN Bangkalan Pule I	
3.	Hj. TATIK RUKINI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	
4.	Drs.ABD. CHAKIM	SDN Bangkalan Pule I	
5.	LILIK KHOLILAH, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	
6.	UMU SALAMAH, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	
7.	RAHAYU, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	
8.	MOCH. SYAFIUDIN	SDN Bangkalan Pule I	
9.	KADIS, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	
10.	ANITA RAKHMAWATI	SDN Bangkalan Pule I	
11.	RESTY DYAH R.	SDN Bangkalan Pule I	
12.	Hj. TETTY DES, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	
13.	H. RUSWATI HARIJATI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	
14.	Hj. SRI HARTINI TA, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	
15.	PONIYEM, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	
16.	LILIS SETYOWATI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	
17.	PURYONO EDI S, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	KET
18.	NA'IM, A.Ma	SDN Bangkalan Pule II	
19.	KUSNAN	SDN Bangkalan Pule II	
20.	DWI PRIYANTO	SDN Bangkalan Pule II	
21.	ERISCHA FEBRIANA R.	SDN Bangkalan Pule II	
22.	ARIS	SDN Bangkalan Pule II	
23.	KARNO, BA	SDN Dukuh Agung I	
24.	SULASTRI, A.Ma. Pd	SDN Dukuh Agung I	
25.	ISMIYATIN, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	
26.	SUYUD, Gn.Kd.	SDN Dukuh Agung I	
27.	DARSONO, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	
28.	SISWANTO, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	
29.	MASITAH, S.Pd.I	SDN Dukuh Agung I	
30.	SUTADJI	SDN Dukuh Agung I	
31.	ANTARI	SDN Dukuh Agung I	
32.	LILIK PUJI ASTUTIK, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	
33.	KUSNAN, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	
34.	INDRA WAHYU S.	SDN Dukuh Agung I	
35.	SUMARDI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	
36.	UMI NURHAYATI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	
37.	SUDARMI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	
38.	SYUHADA, S.Pd SD	SDN Dukuh Agung II	
39.	LILIK SULIYATI, A.Ma. Pd.	SDN Dukuh Agung II	
40.	MINAR ROCHMAN, A. Ma	SDN Dukuh Agung II	
41.	ANIS PUJI RIONO, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	
42.	RUDIANTO, A. Ma	SDN Dukuh Agung II	
43.	I'IN DAYATI, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	
44.	DASA BUDI S, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	
45.	KHUSNIYAH, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	
46.	NANTO, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	
47.	SUWARNI	SDN Pengumbulanadi I	

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	KET
48.	SUPARTIN, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	
49.	WAHAB	SDN Pengumbulanadi I	
50.	SARONI	SDN Pengumbulanadi I	
51.	NUR THOYIBAH	SDN Pengumbulanadi I	
52.	NUR AGUSTIN, A.Ma	SDN Pengumbulanadi I	
53.	LAILI NI'MAH, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	
54.	ENDAH NOERHAYATI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	
55.	SUWITO, S.Pd, M.Pd	SDN Pengumbulanadi II	
56.	SAMIJO, A.Ma.Pd	SDN Pengumbulanadi II	
57.	RAHAYU ENDANG P.	SDN Pengumbulanadi II	
58.	SITI DJUWARIYAH, A.Ma. Pd	SDN Pengumbulanadi II	
59.	SRI RIYADINI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi II	
60.	RUKIYAH	SDN Pengumbulanadi II	
61.	LILIS SURYANI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi II	
62.	SITI SRI MULYANI, A.Ma.Pd	SDN Pengumbulanadi II	
63.	SAFI'UDDIN, A.Ma	SDN Pengumbulanadi II	
64.	ADIB SUJARWADI	SDN Pengumbulanadi II	
65.	TIKNO	SDN Pengumbulanadi II	
66.	YENI YULI VITASARI	SDN Pengumbulanadi II	
67.	URIFAH	SDN Guminingrejo	
68.	NURIYANAH, S.Pd	SDN Guminingrejo	
69.	SUKARNI	SDN Guminingrejo	
70.	ROUDLINAH, S.Pd.I	SDN Guminingrejo	
71.	SUDARSONO, S.Pd	SDN Guminingrejo	
72.	DIDIK HERYANTO, S.Pd	SDN Guminingrejo	
73.	NARTI, S.Pd	SDN Guminingrejo	
74.	YULI INDRIYATI, S.Pd	SDN Guminingrejo	
75.	M. ZAKARIYAH, S.Pd	SDN Guminingrejo	
76.	JAILUN	SDN Guminingrejo	

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

4. Panitia

Panitia pelaksana kegiatan ini berjumlah tujuh orang yang terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara kelompok kerja dan tiga orang dari anggota kelompok kerja.

Tabel 4.10
Daftar Panitia Pelaksana Pelatihan/Workshop *Blockgrant*
Guru SD Negeri se Gugus 2 Kecamatan Tikung

NO	JABATAN	UNSUR	NAMA
1.	Pengarah	Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Tikung	Hj. Sultianah, S.Pd M.Pd
2.	Penanggung Jawab	Ketua Gugus 02 Kec. Tikung	Umu Zuhro, S.Pd
3.	Ketua	Ketua KKG Gugus 02 Kec. Tikung	Kadis, S.Pd
4.	Sekretaris	Sekretaris KKG Gugus 02 Kec. Tikung	Kusnan, S.Pd
5.	Bendahara	Bendahara KKG Gugus 02 Kec. Tikung	Hj. Tatik Rukini, S.Pd
6.	Anggota	Pengurus KKG Gugus 02 Kec. Tikung	Nanto, S.Pd
7.	Anggota	Pengurus KKG Gugus 02 Kec. Tikung	Hj. Tety Des. S.Pd
8.	Anggota	Pengurus KKG Gugus 02 Kec. Tikung	Suwito, S.Pd M.Pd

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 2011

(c) Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dirancang dengan pola dukung 30.JP (30/34JP).

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari mulai jam 07.30 s/d 14.00 dengan perhitungan 1 jam tatap muka yaitu 45 menit. Pelatihan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Hari Pertama

Setelah pembukaan, peserta diberi penjelasan tentang latar belakang, tujuan dan harapan yang akan dicapai dalam pelatihan.

Kemudian peserta diberi penjelasan tentang peraturan dan kebijakan yang terkait dengan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru : PK Guru, PKB, Program Linduksi, dan Pendidikan Karakter Bangsa. Selanjutnya pada 2 jam terakhir peserta diajak melakukan sebuah permainan yang terkait erat pemahaman PK Guru dan PKB.

2. Hari Kedua

Peserta diberi penjelasan tentang gambaran secara menyeluruh pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru bukti-bukti hasil (PK Guru) dan seluruh instrument pendukungnya. Pada materi ini peserta juga diberikan latihan pengamatan, membuat deskripsi hasil pengamatan, membandingkan hasil pengamatan dengan indikator setiap kompetensi serta membuat penilaian kompetensi.

3. Hari Ketiga

Peserta diberi pelatihan bagaimana melakukan analisis hasil PK Guru dengan cara melakukan verifikasi nilai kompetensi dengan membandingkan skor setiap indikator kompetensi dengan bukti-bukti hasil pengamatan dan pemantauan kinerja Guru. Dengan demikian peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk melihat secara kritis tentang validitas nilai kompetensi secara utuh sesuai dengan tujuan dilaksanakannya PK Guru. Kemudian peserta pelatihan diberikan penjelasan dan tugas bagaimana merencanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Setelah kegiatan tersebut, Pelatihan untuk guru dan kepala sekolah telah selesai, sedangkan kelompok pengawas masih mendapatkan penjelasan tentang penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah serta bagaimana melakukan penilaiannya. Materi hanya diberikan kepada pengawas karena pengawas akan menjadi penilai kinerja kepala sekolah. Pelatihan diakhiri dengan tes untuk melihat kompetensinya sebagai penilai kinerja guru. Pada tahap ini, para peserta pelatihan diharapkan dapat membuktikan bahwa dirinya kompeten sebagai penilai kinerja guru.

(d) Metode Pelatihan

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode pelatihan bagi orang dewasa (andragogi), yaitu ceramah, Tanya jawab, praktik, permainan, penugasan kelompok, dan kerja mandiri.

Dengan cara ini diharapkan peserta mampu memahami seluruh materi yang disajikan dalam pelatihan ini.

(e) Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Setelah 3 hari kegiatan pelatihan penilai PK Guru dilaksanakan dengan materi pokok kebijakan tentang Pengembangan Profesi Guru pendidikan Karakter Bangsa, Overview PKG dan PKB, Praktik penilaian Kinerja Guru, Perencanaan PKB serta Penilaian Kinerja Kepala Sekolah bagi pengawas, hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pelatihan Penilaian PK Guru bagi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas terselenggara dengan baik sesuai dengan rencana, semua materi pelatihan tersampaikan sesuai dengan jadwal.
2. Peserta yang hadir dari hari pertama sampai dengan hari ketiga sebanyak 100% terdiri atas:

Tabel 4.11
Daftar Hadir Peserta Pelatihan/Workshop Blockgrant
Guru SD Negeri se Gugus 2 Kecamatan Tikung

NO	PESERTA	SEHARUSNYA HADIR	HADIR	%	TIDAK HADIR KARENA			KETR
					S	I	A	
1	Guru	76	76	100	-	-	-	-
	JUMLAH	76	76	100	-	-	-	-

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 2011

3. Berdasarkan Hasil Tes akhir diketahui daya serap peserta rata-rata 85% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Daya Serap Materi Pelatihan/Workshop Blockgrant
Guru SD Negeri se Gugus 2 Kecamatan Tikung

NO	PESERTA	DAYA SERAP	KETR
1	Guru	75%	
	JUMLAH	7,5	

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

4. Peserta Terbaik

Berdasarkan hasil tes terakhir dan penilaian aspek lainnya, terpilih peserta terbaik sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Terbaik Daya Serap Materi Pelatihan/Workshop Blockgrant
Guru SD Negeri se Gugus 2 Kecamatan Tikung

PRKT	UNSUR	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1.	Guru	92	1

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

(f) Pertanggung Jawaban Dana

Tabel 4.14
Penggunaan Dana Anggaran Blockgrant
Pada Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)
Gugus Sekolah 02 Kecamatan Tikung

No	Mata Anggaran	Jumlah Uang	Keter
1	Persiapan	Rp 1.500.000,-	
2	HR Narasumber	Rp 4.200.000,-	
3	HR panitia	Rp 1.600.000,-	
4	Transport Narasumber	Rp 550.000,-	
5	Transport Panitia	Rp 400.000,-	
6	Transport Peserta	Rp 380.000,-	
7	Bahan Pelatihan	Rp 600.000,-	
8	ATK Pelatihan	Rp 210.000,-	
9	Konsumsi	Rp 2.820.000,-	
10	Koordinasi/Konsultasi	Rp 200.000,-	
11	Laporan/Dokumentasi	Rp 2.250.000,-	
12	Pajak	Rp 290.000,-	
	JUMLAH	Rp. 15.000.000,-	

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

Dalam wawancara dengan Ibu Suhartini Narasumber

Pelatihan *Blockgrant* KKG dijelaskan bahwa:

“Dalam pelatihan PKG pada penilaian kinerja guru mempunyai tujuan yaitu: Memahami mekanisme dan prosedur Penilaian Kinerja Guru (PKG); Memahami mekanisme dan prosedur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); Dapat melakukan penilaian kinerja guru secara efektif; Mampu menyusun kegiatan PKB” (wawancara dengan Ibu Suhartini, salah satu Narasumber Pelatihan *Blockgrant*, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 26 Februari 2014 pukul 09.00 WIB).

Kemudian Bapak Ali Mahmudi juga menambahkan bahwa:

“Program pelatihan ini harus direncanakan sesuai standar waktu dan materinya agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan. Dan metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, praktik, permainan, penugasan kelompok, dan kerja mandiri” (wawancara dengan Bapak Ali Mahmudi, salah satu Narasumber Pelatihan *Blockgrant*, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 27 Februari 2014 pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa setelah pelatihan PKG, peserta/guru harus memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi tersebut yaitu memahami materi PKG, menghitung nilai kinerja dan menyusun PKB. Hal tersebut dapat dilihat dari tindak lanjut yang harus dilakukan peserta pelatihan PKG setelah dinyatakan lulus dalam pelatihan PKG dengan menyusun RTL: menyiapkan bukti fisik penilaian dan menyusun PKB.

Untuk mengetahui kemampuan peserta *Workshop* sebelum dan sesudah pelatihan, maka panitia mengadakan uji materi *Pre Test* dan *Post Test*. Di bawah ini adalah hasil rekapitulasi *Pre Test* dan

Post Test. Rekapitulasi hasil *Pre Test* kepada seluruh peserta *Workshop* yaitu Guru SD gugus 02 Kecamatan Tikung Tahun 2011 *sebelum* pelaksanaan *Workshop* dengan materi sesuai dengan Proposal Pengajuan *Blockgrant* sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Angket terhadap Materi Test (*Pre Test*) Tahun 2011
Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)
Gugus Sekolah 02 Kecamatan Tikung

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
1.	UMU ZUHRO, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	82	
2.	SUPRIJATI, A.Ma.Pd	SDN Bangkalan Pule I	76	
3.	Hj. TATIK RUKINI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	76	
4.	Drs.ABD. CHAKIM	SDN Bangkalan Pule I	76	
5.	LILIK KHOLILAH, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	76	
6.	UMU SALAMAH, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	80	
7.	RAHAYU, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	75	
8.	MOCH. SYAFIUDIN	SDN Bangkalan Pule I	75	
9.	KADIS, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	77	
10.	ANITA RAKHMAWATI	SDN Bangkalan Pule I	74	
11.	RESTY DYAH R.	SDN Bangkalan Pule I	74	76,5
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
12.	Hj. TETTY DES, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	80	
13.	Hj. RUSWATI HARIJATI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	76	
14.	Hj. SRI HARTINI TA, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	77	
15.	PONIYEM, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	76	
16.	LILIS SETYOWATI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	76	
17.	PURYONO EDI S, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	76	
18.	NA'IM, A.Ma	SDN Bangkalan Pule II	76	
19.	KUSNAN	SDN Bangkalan Pule II	76	
20.	DWI PRIYANTO	SDN Bangkalan Pule II	75	
21.	ERISCHA FEBRIANA R.	SDN Bangkalan Pule II	73	
22.	ARIS	SDN Bangkalan Pule II	72	75,7

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
23.	KARNO, BA	SDN Dukuh Agung I	81	
24.	SULASTRI, A.Ma. Pd	SDN Dukuh Agung I	76	
25.	ISMIYATIN, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	76	
26.	SUYUD, Gn.Kd.	SDN Dukuh Agung I	76	
27.	DARSONO, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	76	
28.	SISWANTO, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	75	
29.	MASITAH, S.Pd.I	SDN Dukuh Agung I	76	
30.	SUTADJI	SDN Dukuh Agung I	76	
31.	ANTARI	SDN Dukuh Agung I	71	
32.	LILIK PUJI ASTUTIK, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	74	
33.	KUSNAN, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	71	
34.	INDRA WAHYU S.	SDN Dukuh Agung I	74	75,2
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
35.	SUMARDI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	80	
36.	UMI NURHAYATI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	76	
37.	SUDARMI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	76	
38.	SYUHADA, S.Pd SD	SDN Dukuh Agung II	77	
39.	LILIK SULIYATI, A.Ma. Pd.	SDN Dukuh Agung II	74	
40.	MINAR ROCHMAN, A. Ma	SDN Dukuh Agung II	73	
41.	ANIS PUJI RIONO, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	74	
42.	RUDIANTO, A. Ma	SDN Dukuh Agung II	72	
43.	I'IN DAYATI, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	72	
44.	DASA BUDI S, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	72	
45.	KHUSNIYAH, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	74	74,5
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
46.	NANTO, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	81	
47.	SUWARNI	SDN Pengumbulanadi I	75	
48.	SUPARTIN, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	75	
49.	WAHAB	SDN Pengumbulanadi I	75	
50.	SARONI	SDN Pengumbulanadi I	74	
51.	NUR THOYIBAH	SDN Pengumbulanadi I	75	
52.	NUR AGUSTIN, A.Ma	SDN Pengumbulanadi I	74	
53.	LAILI NI'MAH, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	74	
54.	ENDAH NOERHAYATI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	74	75,2

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
55.	SUWITO, S.Pd, M.Pd	SDN Pengumbulanadi II	80	
56.	SAMIJO, A.Ma.Pd	SDN Pengumbulanadi II	75	
57.	RAHAYU ENDANG P.	SDN Pengumbulanadi II	71	
58.	SITI DJUWARIYAH, A.Ma. Pd	SDN Pengumbulanadi II	75	
59.	SRI RIYADINI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi II	80	
60.	RUKIYAH	SDN Pengumbulanadi II	76	
61.	LILIS SURYANI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi II	75	
62.	SITI SRI MULYANI, A.Ma.Pd	SDN Pengumbulanadi II	74	
63.	SAFI'UDDIN, A.Ma	SDN Pengumbulanadi II	76	
64.	ADIB SUJARWADI	SDN Pengumbulanadi II	74	
65.	TIKNO	SDN Pengumbulanadi II	74	
66.	YENI YULI VITASARI	SDN Pengumbulanadi II	74	75,3
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
67.	URIFAH	SDN Guminingrejo	75	
68.	NURIYANAH, S.Pd	SDN Guminingrejo	75	
69.	SUKARNI	SDN Guminingrejo	75	
70.	ROUDLINAH, S.Pd.I	SDN Guminingrejo	76	
71.	SUDARSONO, S.Pd	SDN Guminingrejo	76	
72.	DIDIK HERYANTO, S.Pd	SDN Guminingrejo	74	
73.	NARTI, S.Pd	SDN Guminingrejo	74	
74.	YULI INDRIYATI, S.Pd	SDN Guminingrejo	73	
75.	M. ZAKARIYAH, S.Pd	SDN Guminingrejo	73	
76.	JAILUN	SDN Guminingrejo	71	74,2
JUMLAH			5.718	75,3

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Dari hasil pelaksanaan *Pre Test* tahun 2011 terhadap materi yang akan disampaikan dalam *workshop* Guru SD Se Gugus 02 Kecamatan Tikung dapat diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh peserta 76 orang adalah 5.718, sedangkan nilai rata-rata seluruh peserta 75,3. Selanjutnya pada hari terakhir sebelum

penutupan *workshop* yaitu pada hari ke tiga untuk mengetahui perkembangan penguasaan materi maka dilaksanakan *Post Test* dengan soal yang sama ketika digunakan sebagai Soal *Pre Test* kepada seluruh peserta yaitu Guru SD gugus 02 Kecamatan Tikung Tahun 2011 dapat dilihat dari rekapitulasi nilai hasil test sebagai berikut:

Tabel4.16
Hasil Angket terhadap Materi Test (*Post Test*) Tahun 2011
Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)
Gugus Sekolah 02 Kecamatan Tikung

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
1.	UMU ZUHRO, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	92	
2.	SUPRIJATI, A.Ma.Pd	SDN Bangkalan Pule I	82	
3.	Hj. TATIK RUKINI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	80	
4.	Drs.ABD. CHAKIM	SDN Bangkalan Pule I	83	
5.	LILIK KHOLILAH, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	82	
6.	UMU SALAMAH, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	86	
7.	RAHAYU, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	81	
8.	MOCH. SYAFIUDIN	SDN Bangkalan Pule I	83	
9.	KADIS, S.Pd	SDN Bangkalan Pule I	86	
10.	ANITA RAKHMAWATI	SDN Bangkalan Pule I	81	
11.	RESTY DYAH R.	SDN Bangkalan Pule I	80	83,3
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
12.	Hj. TETTY DES, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	89	
13.	H. RUSWATI HARIJATI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	87	
14.	Hj. SRI HARTINI TA, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	86	
15.	PONIYEM, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	80	
16.	LILIS SETYOWATI, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	87	
17.	PURYONO EDI S, S.Pd	SDN Bangkalan Pule II	86	
18.	NA'IM, A.Ma	SDN Bangkalan Pule II	83	
19.	KUSNAN	SDN Bangkalan Pule II	87	

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
20.	DWI PRIYANTO	SDN Bangkalan Pule II	82	
21.	ERISCHA FEBRIANA R.	SDN Bangkalan Pule II	81	
22.	ARIS	SDN Bangkalan Pule II	81	84,5
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
23.	KARNO, BA	SDN Dukuh Agung I	88	
24.	SULASTRI, A.Ma. Pd	SDN Dukuh Agung I	86	
25.	ISMIYATIN, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	84	
26.	SUYUD, Gn.Kd.	SDN Dukuh Agung I	83	
27.	DARSONO, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	87	
28.	SISWANTO, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	85	
29.	MASITAH, S.Pd.I	SDN Dukuh Agung I	86	
30.	SUTADJI	SDN Dukuh Agung I	87	
31.	ANTARI	SDN Dukuh Agung I	82	
32.	LILIK PUJI ASTUTIK, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	85	
33.	KUSNAN, S.Pd	SDN Dukuh Agung I	86	
34.	INDRA WAHYU S.	SDN Dukuh Agung I	85	85,3
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
35.	SUMARDI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	90	
36.	UMI NURHAYATI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	86	
37.	SUDARMI, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	83	
38.	SYUHADA, S.Pd SD	SDN Dukuh Agung II	86	
39.	LILIK SULIYATI, A.Ma. Pd.	SDN Dukuh Agung II	85	
40.	MINAR ROCHMAN, A. Ma	SDN Dukuh Agung II	87	
41.	ANIS PUJI RIONO, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	83	
42.	RUDIANTO, A. Ma	SDN Dukuh Agung II	86	
43.	I'IN DAYATI, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	84	
44.	DASA BUDI S, A.Ma	SDN Dukuh Agung II	85	
45.	KHUSNIYAH, S.Pd	SDN Dukuh Agung II	86	85,5
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
46.	NANTO, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	92	
47.	SUWARNI	SDN Pengumbulanadi I	82	
48.	SUPARTIN, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	83	
49.	WAHAB	SDN Pengumbulanadi I	85	
50.	SARONI	SDN Pengumbulanadi I	82	
51.	NUR THOYIBAH	SDN Pengumbulanadi I	84	

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
52.	NUR AGUSTIN, A.Ma	SDN Pengumbulanadi I	85	
53.	LAILI NI'MAH, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	82	
54.	ENDAH NOERHAYATI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi I	82	84,1
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
55.	SUWITO, S.Pd, M.Pd	SDN Pengumbulanadi II	89	
56.	SAMIJO, A.Ma.Pd	SDN Pengumbulanadi II	85	
57.	RAHAYU ENDANG P.	SDN Pengumbulanadi II	84	
58.	SITI DJUWARIYAH, A.Ma. Pd	SDN Pengumbulanadi II	85	
59.	SRI RIYADINI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi II	89	
60.	RUKIYAH	SDN Pengumbulanadi II	85	
61.	LILIS SURYANI, S.Pd	SDN Pengumbulanadi II	87	
62.	SITI SRI MULYANI, A.Ma.Pd	SDN Pengumbulanadi II	84	
63.	SAFI'UDDIN, A.Ma	SDN Pengumbulanadi II	85	
64.	ADIB SUJARWADI	SDN Pengumbulanadi II	83	
65.	TIKNO	SDN Pengumbulanadi II	82	
66.	YENI YULI VITASARI	SDN Pengumbulanadi II	84	85,2
NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NILAI	RATA2
67.	URIFAH	SDN Guminingrejo	85	
68.	NURIYANAH, S.Pd	SDN Guminingrejo	86	
69.	SUKARNI	SDN Guminingrejo	84	
70.	ROUDLINAH, S.Pd.I	SDN Guminingrejo	85	
71.	SUDARSONO, S.Pd	SDN Guminingrejo	88	
72.	DIDIK HERYANTO, S.Pd	SDN Guminingrejo	87	
73.	NARTI, S.Pd	SDN Guminingrejo	88	
74.	YULI INDRIYATI, S.Pd	SDN Guminingrejo	82	
75.	M. ZAKARIYAH, S.Pd	SDN Guminingrejo	84	
76.	JAILUN	SDN Guminingrejo	81	85,0
JUMLAH			6.439	84,7

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Dari hasil pelaksanaan *Post Test* tahun 2011 terhadap materi yang telah disampaikan selama pelaksanaan *workshop* Guru SD Se Gugus 02 Kecamatan Tikung dapat diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh peserta 76 orang adalah 6.439, sedangkan nilai

rata-rata seluruh peserta 84,7. Hasil pelatihan ini adalah untuk dapat menilai sampai di mana kemampuan guru-guru yang mengikuti pelatihan terkait dengan peningkatan mutu guru dan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi guru. Untuk dapat melakukan pembelajaran yang bagus guna mencapai *output* sekolah yang bagus pula maka pelaksanaan pelatihan ini bisa dinilai dari: *pre test*, pembentukan kompetensi dan *post test*.

Semua peserta pelatihan sebelumnya harus memahami terlebih dahulu mengenai tujuan dari pelatihan tersebut. Dengan adanya pelatihan ini dimaksudkan agar meningkatkan mutu guru-guru di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu sebelum dan setelah pelatihan diadakan penilaian/test untuk mengetahui apa saja materi yang belum dan sudah dipahami oleh peserta.

Hal tersebut diatas sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Umu Zuhro sebagai Peserta Pelatihan *Blockgrant* KKG, berikut ini:

“Kami mengikuti pelatihan ini untuk meningkatkan profesionalitas guru melalui pemberdayaan PKG, pelatihan dilaksanakan selama tiga hari. Ada beberapa materi yang di sampaikan oleh narasumber yaitu Penilaian kinerja guru, Pengembangan keprofesian berkelanjutan, Program induksi guru pemula, Pendidikan budaya karakter bangsa. Setelah pelatihan akan didapatkan hasil pelatihan dengan diadakan pre test dan post test” (wawancara dengan Ibu Umu Zuhro, salah satu peserta pelatihan *blockgrant*, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 27 Februari 2014 pukul 10.00 WIB).

Kemudian Bapak Karno juga menyatakan hal yang sependapat, yaitu:

“Dari hasil pelatihan dapat diketahui apa yang belum dan sudah dipahami pada materi pelatihan tersebut. Materi yang belum dipahami oleh peserta pelatihan: PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan), KTI (Karya Tulis Ilmiah) dan Materi yang sudah dipahami oleh peserta pelatihan: Kompetensi guru yang harus dilakukan oleh semua guru” (wawancara dengan Bapak Karno, salah satu peserta pelatihan *blockgrant*, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 27 Februari 2014 pukul 10.00 WIB).

Guna mendapatkan hasil yang baik dari pelatihan PKG, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Selanjutnya jika dikomparasikan hasil *Workshop blockgrant* ada pengaruhnya terhadap peningkatan prestasi dan kompetensi guru. Dari data dokumentasi pelaksanaan kuesioner yang kami lakukan terhadap seluruh peserta sebelum mengikuti *Workshop Blockgrant* dan sesudah menerima materi *Workshop* proyek *Blockgrant* dengan hasil rekapitulasi nilai sebagai berikut:

Tabel4.17
Rekapitulasi Kompetensi Peningkatan Mutu Guru
Sebelum dan sesudah *Workshop*

NO	NAMA LEMBAGA	NILAI RATA-RATA KOMPETENSI GURU		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1.	Bangkalan Pule I	77	83	
2.	Bangkalan Pule II	76	85	
3.	Dukuh Agung I	75	85	
4.	Dukuh Agung II	75	86	
5.	Pengumbulanadi I	75	84	
6.	Pengumbulanadi II	75	85	
7.	Guminingrejo	74	85	
JUMLAH		527	593	
RATA – RATA SEBELUM WORKSHOP		75		
RATA – RATA SESUDAH WORKSHOP			85	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Untuk menguji ada relevansinya antara hasil dari pelaksanaan *Workshop blockgrant* terhadap nilai prestasi akademik dan mutu hasil pendidikan terhadap prestasi siswa. Hal ini sengaja kami lakukan dengan mengumpulkan data dokumentasi pelaksanaan hasil evaluasi ketika guru sebelum mengikuti *Workshop Blockgrant* dan sesudah menerima materi *Workshop* proyek *Blockgrant* dengan sampel seluruh kelas I s/d VI SD Negeri yang merupakan anggota Gugus 02 yang gurunya mengikuti *Workshop*, dengan hasil rekapitulasi nilai siswa Kelas I s/d VI sebagai berikut:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Nilai Rata-rata Mata Pelajaran Siswa Kelas I s/d VI
Sebelum Workshop

No	Nama Lembaga	Nilai Rata-rata Mata Pelajaran										Rata2
		Agama	PKn	B.indo	IPA	IPS	MTK	Ketramp	PJOK	B.daerh	B.ing	
1	Bangkalan Pule I	74	74	74	74	73	74	74	74	74	74	74
2	Bangkalan Pule II	76	78	77	77	78	77	74	74	75	74	76
3	Dukuh Agung I	79	75	76	76	76	74	78	77	73	72	76
4	Dukuh Agung II	73	73	73	72	69	71	72	72	71	69	71
5	Pengumbulanadi I	70	71	71	70	69	70	70	71	69	69	70
6	Pengumbulanadi II	71	71	70	72	71	70	71	71	71	70	71
7	Guminingrejo	73	72	73	72	72	72	72	71	72	71	72

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Tabel 4.19
Rekapitulasi Nilai Rata-rata Mata Pelajaran Siswa Kelas I s/d VI
Sesudah Workshop

No	Nama Lembaga	Nilai Rata-rata Mata Pelajaran										Rata2
		Agama	PKn	B.indo	IPA	IPS	MTK	Ketramp	PJOK	B.daerh	B.ing	
1	Bangkalan Pule I	82	81	80	78	79	80	82	83	79	81	80
2	Bangkalan Pule II	80	83	83	85	83	83	80	80	82	84	82
3	Dukuh Agung I	82	81	81	82	82	80	80	82	81	79	81
4	Dukuh Agung II	78	80	80	81	79	80	79	78	78	78	79
5	Pengumbulanadi I	78	78	78	77	78	78	79	79	79	77	78
6	Pengumbulanadi II	78	78	78	79	78	78	80	78	79	78	78
7	Guminingrejo	79	79	79	80	79	80	79	79	80	79	79

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Tabel 4. 20
Rekapitulasi Nilai Rata-rata Siswa Kelas I s/d VI
Sebelum dan sesudah *Workshop*

NO	NAMA LEMBAGA	NILAI RATA-RATA SISWA		KETR
		Sebelum	Sesudah	
1.	Bangkalan Pule I	74	80	
2.	Bangkalan Pule II	76	82	
3.	Dukuh Agung I	76	81	
4.	Dukuh Agung II	71	79	
5.	Pengumbulanadi I	70	78	
6.	Pengumbulanadi II	71	78	
7.	Guminingrejo	72	79	
	JUMLAH	509	558	
	RATA – RATA NILAI SEBELUM WORKSHOP	73		
	RATA – RATA NILAI SESUDAH WORKSHOP		80	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Dari uraian pembahasan yang dapat disajikan di atas maka dari semua aspek yang telah diukur dalam pelaksanaan *Blockgrant* mempunyai efektifitas yang tinggi dalam meningkatkan kompetensi Guru, kompetensi kinerja Guru dan peningkatan prestasi hasil belajar siswa setelah dilaksanakan proyek pelatihan dengan dana *Blockgrant* di Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 2011.

2. Faktor yang Mempengaruhi implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan Program *Blockgrant* pemberdayaan KKG, Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung memiliki beberapa hal yang menjadi faktor pendukung. Dalam wawancara dengan Bapak Kusnan selaku panitia pelaksana, beliau memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung pelaksanaan pelatihan PKG di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung sebagai berikut:

“Walaupun pada dasarnya kami belum secara utuh memahami kegunaan PKG tetapi karena adanya bantuan pelatihan dari KKG gugus 02 kec.tikung dan antusiasme teman-teman se-profesi, maka kami dapat melaksanakan pelatihan dan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidik ini dengan baik. Selain itu dengan dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kecamatan Tikung, dan KKG gugus 02 Kecamatan Tikung dalam menunjang kelancaran Workshop ini. Dan terdapat motivasi dari Kepala sekolah, lembaga, dan warga belajar” (wawancara dengan Bapak Kusnan, salah satu Panitia Pelaksana Pelatihan *Blockgrant*, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 21 Februari 2014 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan Keterangan tersebut, maka dapat diketahui beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan *Workshop*/pelatihan KKG gugus 02 Kecamatan Tikung antara lain:

1. Meningkatkan pengembangan profesionalisme dan karier dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik antar anggota kelompok kerja guru.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar peserta didik pada pendidikan dasar dengan mutu pendidikan secara nasional.
3. Peningkatan frekuensi, intensitas, dan kerbermaknaan melalui saling tukar pikiran dan pengalaman antar anggota kelompok kerja guru.
4. Peningkatan profesionalisme anggota kelompok kerja guru yang dibuktikan dengan perubahan perilaku, tingginya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan karier.

Beberapa hal diatas merupakan suatu kelebihan yang memberikan dorongan panitia pelaksana *Workshop*/pelatihan KKG gugus 02 Kecamatan Tikung untuk membantu guru/peserta meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran.

b. Faktor Penghambat

Workshop ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidik dengan materi yang di ajarkan yaitu Penilaian kinerja guru, Pengembangan keprofesian berkelanjutan, Program induksi guru pemula, Pendidikan budaya karakter bangsa. Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan. Berikut wawancara berkaitan dengan hambatan yang

dihadapi dalam implementasi program *blockgrant* KKG dalam peningkatan mutu guru.

Selaku Penanggungjawab *workshop* Ibu Umu Zuhro memberikan penjelasannya mengenai faktor penghambat yang dialami ketika pelaksanaan *workshop* ini, sebagai berikut:

“Sebenarnya guru-guru gugus 02 yang mengikuti Workshop ini belum memahami materi-materi yang akan disampaikan itu secara utuh, oleh karena itu mereka mengikuti Workshop ini. Dan untuk pelaksanaan workshop ini sendiri terhambat oleh waktu dan dana yang tidak banyak. Dan juga kendala pelaksanaan hasil pelatihan tersebut yaitu Sarana dan Prasarana yang tidak memadai” (wawancara dengan Ibu Umu Zuhro, salah satu Narasumber Pelatihan *Blockgrant*, di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, 21 Februari 2014 pukul 10.00 WIB).

Dari penjelasan di atas, dapat diidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan *Workshop*/pelatihan KKG gugus 02 Kecamatan Tikung antara lain:

1. Penggunaan dana dan waktu yang terbatas.
2. Sarana dan Prasarana tidak memadai.
3. Kurangnya pemahaman guru mengenai PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan), KTI (Karya Tulis Ilmiah).
4. Kompetensi guru yang belum dilaksanakan.

Dari keterangan diatas mengandung suatu pemahaman bahwa untuk dapat melaksanakan *Workshop*/pelatihan ini dengan baik diperlukan waktu dan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, upaya pendampingan/pengawasan harus tetap diberikan oleh pihak yang

berkompeten guna meningkatkan mutu guru/pendidik. Dari hasil *Workshop* ini diharapkan terjadi peningkatan mutu dan kinerja guru se gugus 02 Kecamatan Tikung. Panitia juga berharap pelatihan peningkatan mutu dari *Blockgrant* mohon dilanjutkan dan ditingkatkan waktu dan dana yang digunakan untuk peningkatan guru dan kinerja semua guru.

D. Analisis Data

1. Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahap awal dari pelaksanaan sebuah program. Dengan sosialisasi, para aktor pelaksana dapat mengetahui tujuan dari program yang akan dilaksanakan. Selain itu, juga menambah pengetahuan mengenai program yang akan dijalankan. Sosialisasi juga merupakan sarana untuk membuat suatu rencana kegiatan. Sehingga program yang akan dijalankan sesuai dengan aturan yang semestinya. Pada program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung ini, sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan atas petunjuk dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing organisasi/lembaga.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan program *blockgrant* dalam bentuk bantuan dana Kelompok Kerja Guru (KKG), Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan sosialisasi kepada ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) mengenai adanya bantuan *blockgrant* dari pemerintah dengan program peningkatan mutu guru/pendidik. Setelah Ketua KKG menerima informasi tersebut, kemudian mensosialisasikan kepada seluruh guru untuk merencanakan beberapa kegiatan yang menunjang mutu pendidikan. Sehingga proses sosialisasi ini penting untuk membuat suatu rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan program yang dicanangkan yaitu peningkatan mutu guru.

b. Pengajuan Proposal

Pada tahap pengajuan proposal, dilakukan setelah sosialisasi selesai. Pengajuan proposal ini penting karena merupakan gambaran sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga, dalam melaksanakan suatu program terdapat pedoman yang telah dibuat sebelumnya. Dalam program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung ini, Ketua KKG membuat proposal untuk diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang akan diseleksi.

Dalam Pelaksanaan seleksi ada beberapa hal yang menjadi acuan Dinas Pendidikan untuk meloloskan organisasi KKG mendapatkan bantuan *blockgrant* yaitu mempunyai struktur

organisasi kepengurusan yang disahkan oleh dinas pendidikan kecamatan/kabupaten/kota/provinsi atau lembaga berwenang lainnya; Kepengurusan organisasi harus memperhatikan/kepedulian terhadap gender yang merupakan kombinasi antara ketua, bendahara, dan sekretaris dengan jumlah proporsional sesuai dengan kondisi di daerah; Masih aktif melaksanakan kegiatan setidaknya dalam satu tahun terakhir ditunjukkan dengan adanya lampiran daftar hadir secara berkala, jadwal kegiatan, laporan dan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan; Mempunyai rekening yang masih aktif pada Bank Pemerintah atas nama KKG (bukan atas nama pribadi); memiliki nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KKG; memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel dibuktikan dengan menyerahkan contoh kegiatan dan keuangan.

Setelah syarat-syarat dalam pembuatan proposal telah dipenuhi, maka Dinas Pendidikan akan menyeleksi lolos tidaknya proposal tersebut. Apabila lolos, maka tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan akan melakukan survey lapangan yang akan mencocokkan dengan data yang ada di proposal. Data yang lolos akan diusulkan untuk pencairan dana. Dengan adanya keharusan dalam penyusunan proposal ini, maka para pelaksana juga diberi pelatihan dan pengetahuan mengenai cara membuat laporan keuangan dan rancangan kegiatan. Sehingga mereka tidak hanya menunggu mengenai kegiatan apa saja yang akan mereka kerjakan,

tetapi juga terlibat langsung dengan pembuatan kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan maka komunikasi pelaksanaan program tidak hanya satu arah melainkan dua arah yaitu antara pemerintah dan masyarakat ataupun sebaliknya.

c. Pencairan Dana

Tahap pencairan dana merupakan tahap yang paling krusial. Hal ini dikarenakan sering terjadi penyelewengan dalam tahap ini. Dana merupakan modal dasar dari dilaksanakannya suatu kegiatan. Dalam implementasi program, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program untuk menjamin terlaksananya program, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung ini, pencairan dana dilakukan setelah pengajuan proposal disetujui oleh tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Sejumlah dana telah dialokasikan oleh Dinas Pendidikan guna menunjang pelaksanaan program *blockgrant* KKG. Pencairan dana langsung dimasukkan ke rekening ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) yang bersangkutan. Setelah terdapat perjanjian dalam hal penggunaan uang sesuai dengan aturan maka dana bantuan *blockgrant* ini dapat segera dicairkan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan pendidikan. Proses implementasi program yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah memenuhi kriteria efektif hal ini terlihat dari adanya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah biaya atau dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Namun, transparansi dana harus dilakukan dengan dukungan seluruh pihak pelaksana program. Hal ini dikarenakan dana merupakan sektor yang paling rawan akan adanya kecurangan.

d. Pelaksanaan Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Persoalan-persoalan implementasi program *Blockgrant* KKG yang *urgen* untuk diketengahkan pada konteks ini sebenarnya berujung pada kesiapan organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kinerjanya di dalam melaksanakan penilaian kinerja guru. Kemampuan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk mengembangkan potensi setiap guru dengan berbagai kegiatan memberikan konsekuensi pada implikasi dalam pelaksanaan praktis pendidikan. Program pendidikan di daerah semestinya lebih mengutamakan dimensi kemandirian yang didasarkan kepada analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan di dalam

organisasi KKG, Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan implementasi program *Blockgrant* KKG melibatkan berbagai elemen, yang dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai instansi yang terkait dengan masalah pendidikan. Setiap elemen yang terlibat melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya agar program peningkatan mutu guru dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks implementasi program *blockgrant* KKG Dinas Pendidikan berkapasitas sebagai instansi terkait secara struktural membawahi organisasi/lembaga pendidikan, termasuk KKG Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Menurut Edward bahwa kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana program berperan penting untuk mewujudkan implementasi program yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana program misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana program akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Program *Blockgrant* KKG ini diawasi langsung oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan pemantauan/evaluasi pelaksanaan program dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional. Pemantauan/evaluasi pelaksanaan program ini dilakukan dengan membuat laporan oleh panitia kegiatan/workshop untuk mengetahui apakah bantuan telah tepat sasaran atau belum.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengetahui program yang mereka buat berjalan dengan baik atau tidak dilapangan dan sesuaikan dengan tujuan dari pembuatan program *blockgrant* ini. Dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan program ini sangat diperlukan untuk mensukseskan program *Blockgrant* ini. Konsistensi dari para pelaksana untuk mencari cara dalam peningkatan mutu pendidikan ini merupakan bagian dari perwujudan dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan dari program *blockgrant* KKG ini.

Dalam mengimplementasikan suatu program agar dapat berjalan dengan sempurna maka tujuan dan sasaran yang terdapat dalam program tersebut harus dipahami oleh masing-masing pelaksana. Jika implementasi program ingin berjalan efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Pelaksana yang dimaksud disini adalah guru yang mengikuti pelatihan. Guru

adalah fitur yang sangat berperan dalam proses dan hasil belajar siswa. Karakter guru perlu dibangun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu dari pelatihan PKG dan PKB, guru-guru harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana fungsi pelatihan itu. Selanjutnya pelatihan ini harus dijalankan sesuai dengan proposal yang sudah di ajukan dibuat dalam bentuk laporan kegiatan mencakup yaitu jadwal pelatihan; pengarah, narasumber, peserta dan panitia; pelaksanaan pelatihan; metode pelatihan; hasil pelaksanaan kegiatan; pertanggungjawaban.

Untuk dapat mengetahui tingkat potensi diri guru/pendidik maka dilaksanakan pelatihan Pre tes (Tes awal) yang berguna dalam menjajaki proses pelatihan yang akan dilaksanakan dan Post tes (Tes Akhir) yang berguna dalam melihat keberhasilan pelatihan. Adapun dalam pelaksanaan pelatihan ini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber untuk menunjang peningkatan mutu guru/pendidik diantaranya: Memahami mekanisme dan prosedur Penilaian Kinerja Guru (PKG); Memahami mekanisme dan prosedur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); Dapat melakukan penilaian kinerja guru secara efektif; Mampu menyusun kegiatan PKB.

Guna mendapatkan hasil yang baik dari pelatihan PKG, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Beberapa ahli pelaksanaan program telah menguraikan bahwasannya untuk mengimplementasikan suatu program terdapat dua langkah yang ada, yaitu dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program derivate atau turunan.

Upaya yang dilakukan oleh Organisasi Kelompok Kerja Guru maupun Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program. Keberhasilan Program *Blockgrant* ini dapat diukur dalam pelaksanaan *Blockgrant* mempunyai efektifitas yang tinggi dalam meningkatkan kompetensi Guru, kompetensi kinerja Guru dan peningkatan prestasi hasil belajar siswa setelah dilaksanakan proyek pelatihan dengan dana *Blockgrant* di Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 2011.

2. Faktor yang Mempengaruhi implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan Program *Blockgrant* pemberdayaan KKG, Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung terdapat beberapa faktor pendukung yang diharapkan mampu menyukseskan

pelaksanaan Program *Blockgrant*. Faktor pendukung internal dan eksternal merupakan sumber motivasi dan kekuatan bagi KKG Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk melaksanakan program-program sekolah. Adanya dukungan dari berbagai pihak merupakan modal bagi KKG Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung untuk meningkatkan pengembangan profesionalisme dan karier dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik antar anggota kelompok kerja guru.

Motivasi belajar yang tinggi dan keinginan untuk terus maju dan mengembangkan kemampuan mengajar maupun kelembagaan menjadi salah satu pendukung KKG Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung. Para guru memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar peserta didik pada pendidikan dasar dengan mutu pendidikan secara nasional.

Faktor pendukung di atas menjelaskan bahwa adanya kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas mengajar yang didukung oleh pemerintah dengan program *Blockgrant* KKG yang dibuat melalui prosedur yang telah ditetapkan. Program ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

b. Faktor Penghambat

Sesuai hasil wawancara yang telah disajikan di pembahasan sebelumnya dapat diidentifikasi mengenai faktor penghambat implementasi program *Blockgrant* KKG, yaitu:

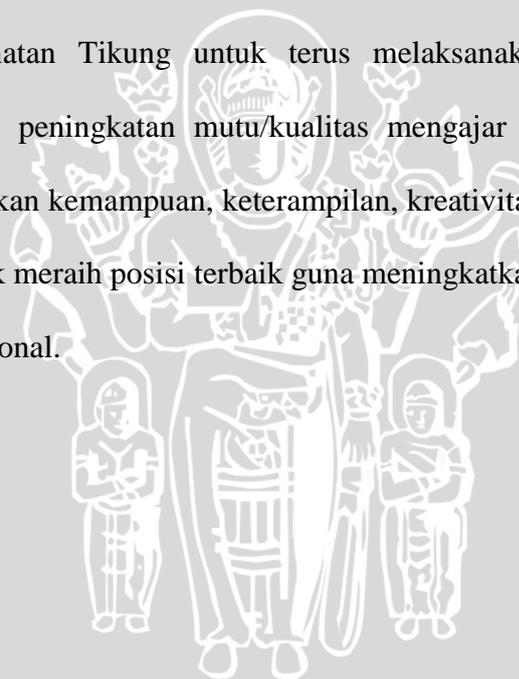
1. Penggunaan dana dan waktu yang terbatas.
2. Sarana dan Prasarana tidak memadai.
3. Kurangnya pemahaman guru mengenai PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan), KTI (Karya Tulis Ilmiah).
4. Kompetensi guru yang belum dilaksanakan.

Secara umum kegiatan pelaksanaan program *Blockgrant* KKG ini belum dimengerti secara utuh tentang tujuan, dasar hukum, dan sasaran program *Blockgrant*. Tetapi kemampuan KKG sebagai wadah pelaksanaan berbagai kegiatan yang relevan dengan peningkatan kompetensi, pengembangan profesionalisme, dan pembinaan karier guru ditingkat kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi yang memadai telah mampu melaksanakan program kebijakan *Blockgrant* semaksimal mungkin. Hal ini sebagaimana dikemukakan Williams tentang *implementation capacity* yaitu kemampuan suatu organisasi/aktor yang akan melaksanakan program menentukan sukses tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada dasarnya mewujudkan tujuan-tujuan dari program kebijakan menjadi kenyataan dengan praktik di lapangan seringkali menemui hambatan. Sehingga perjalanan untuk mengimplementasikan

program itu tidak bisa berjalan mulus dan efektif. Dan hal inilah kemudian disebut *implementation gap*. Segala permasalahan yang timbul segera direspon dan dicari langkah solusi. Respon yang cepat merupakan bentuk pelayanan organisasi terhadap peserta organisasi KKG. Hambatan yang timbul merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan nilai-nilai cultural yang ada.

Dengan demikian adanya faktor penghambat mampu memberikan dorongan dan motivasi bagi KKG Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung untuk terus melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan mutu/kualitas mengajar guru/pendidik dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, kreativitas mengajar peserta didik untuk meraih posisi terbaik guna meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data mengenai pelaksanaan program *blockgrant* pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam rangka meningkatkan mutu guru di SD Negeri se Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

3. Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan terdiri dari empat tahap yaitu:

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan dalam pemberian bantuan *blockgrant* dimulai dari pemerintah pusat. Untuk kemudian pemerintah pusat memberikan perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang selanjutnya diberikan kepada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung. Setelah itu dilanjutkan kepada Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG). Kemudian ketua KKG memberikan sosialisasi kepada peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program peningkatan mutu guru ini. Pada tahap ini juga dilakukan verifikasi calon peserta program.

b. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal dilakukan setelah sosialisasi dilakukan. Pada tahap ini, proposal yang diajukan merupakan laporan tertulis mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan dana yang dianggarkan. Sehingga para pelaksana program melaksanakan sendiri program atau kegiatan yang telah mereka buat sebelumnya. Pengajuan proposal ini dilakukan oleh Ketua KKG yang diajukan kepada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung dan selanjutnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

c. Pencairan Dana

Tahap ini dilakukan setelah pengajuan proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan telah dilakukan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. Kemudian pencairan dana akan dilakukan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah mencapai kesepakatan antara pihak pemberi dana dan penerima dana. Untuk selanjutnya dana tersebut digunakan dalam pelaksanaan program.

d. Pelaksanaan kegiatan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Pada pelaksanaan Program *Blockgrant* di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung ini, pelaksanaan program dimulai dari penetapan jadwal, penetapan panitia dan narasumber, penetapan metode pelatihan, pelaksanaan kegiatan selama tiga hari, pelaporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban atas dana yang dikeluarkan.

Selain keempat proses implementasi di atas, untuk mengukur hasil kegiatan pelatihan dengan peningkatan mutu guru juga digunakan angket yang disebar sebelum dan sesudah program dijalankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan *blockgrant* ini efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja Guru–Guru SD Negeri se Gugus 2 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, terbukti terjadi peningkatan yang signifikan peningkatan kompetensi guru sebelum dan sesudah pelaksanaan program *blockgrant*.

4. Dalam implementasi program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap peningkatan mutu guru pada Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan terdapat faktor pendukung dan penghambat antara lain:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang terdapat dalam pelaksanaan program ini antara lain meningkatkan pengembangan profesionalisme dan karier dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik antar anggota kelompok kerja guru, meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar peserta didik pada pendidikan dasar dengan mutu pendidikan secara nasional, peningkatan frekuensi, intensitas, dan kerbermaknaan melalui saling tukar pikiran dan pengalaman antar anggota kelompok kerja guru, peningkatan profesionalisme anggota kelompok kerja guru yang dibuktikan dengan perubahan perilaku, tingginya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan karier.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program ini antara lain penggunaan dana dan waktu yang terbatas, sarana dan prasarana tidak memadai, kurangnya pemahaman guru mengenai PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan), KTI (Karya Tulis Ilmiah) dan kompetensi guru yang belum dilaksanakan.

B. Saran

Dengan efektifitas yang sangat tinggi pelaksanaan dan implementasi program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap peningkatan mutu guru dan peningkatan mutu hasil prestasi belajar siswa di SD Negeri Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan maka disarankan:

1. Kepada Pemerintah Daerah perlu terus mendorong pemerataan program peningkatan pemberdayaan pendidik sehingga peningkatan mutu guru dapat merata pada SD Negeri yang ada di wilayah kecamatan– kecamatan secara menyeluruh daerah Kabupaten Lamongan.
2. Para aktor yang terlibat dalam bidang pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan program ini dengan baik dengan tujuan agar kinerja dan mutu para tenaga pendidik meningkat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Wahab, Solichin 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cipi S.A. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Farida Indrati, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamalik, Oemar. 2002. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hikmat, R. Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives- vision Analysis and Practice*. Melbourne: Longman
- Jones, C.O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: CV Rajawali.
- Moleong. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nursisto, 2003. *Peningkatan Prestasi Prestasi Sekolah Menengah*. Jakarta. Insan Cendekia
- Risyanti Riza dan Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: ALqaprint Jatinangor
- Simamora, Henry. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Soehino. 2006. *Hukum Tata Negara; Teknik Perundang-undangan (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: BPFE
- Soemarmo. 2005. *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Magister Universitas Diponegoro
- Stewart, A.M. 1998. *Empowering People*. Yogyakarta: Kanisius
- Taliziduhu, Ndraha, 2004, *Budaya Organisasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, Cet. 13
- Wasistiono, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Haji Masagung
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Artikel Lain

- Haedar Akib dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*
- Laporan Pendidikan Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, 2011
- Laporan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2011

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Kompetensi Guru.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

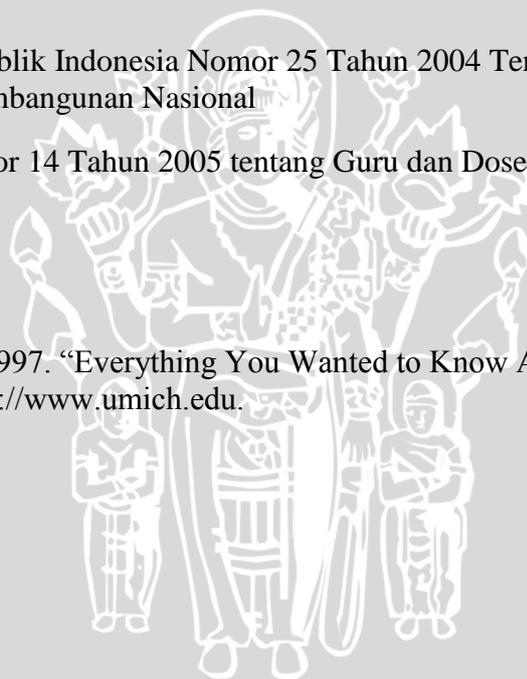
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

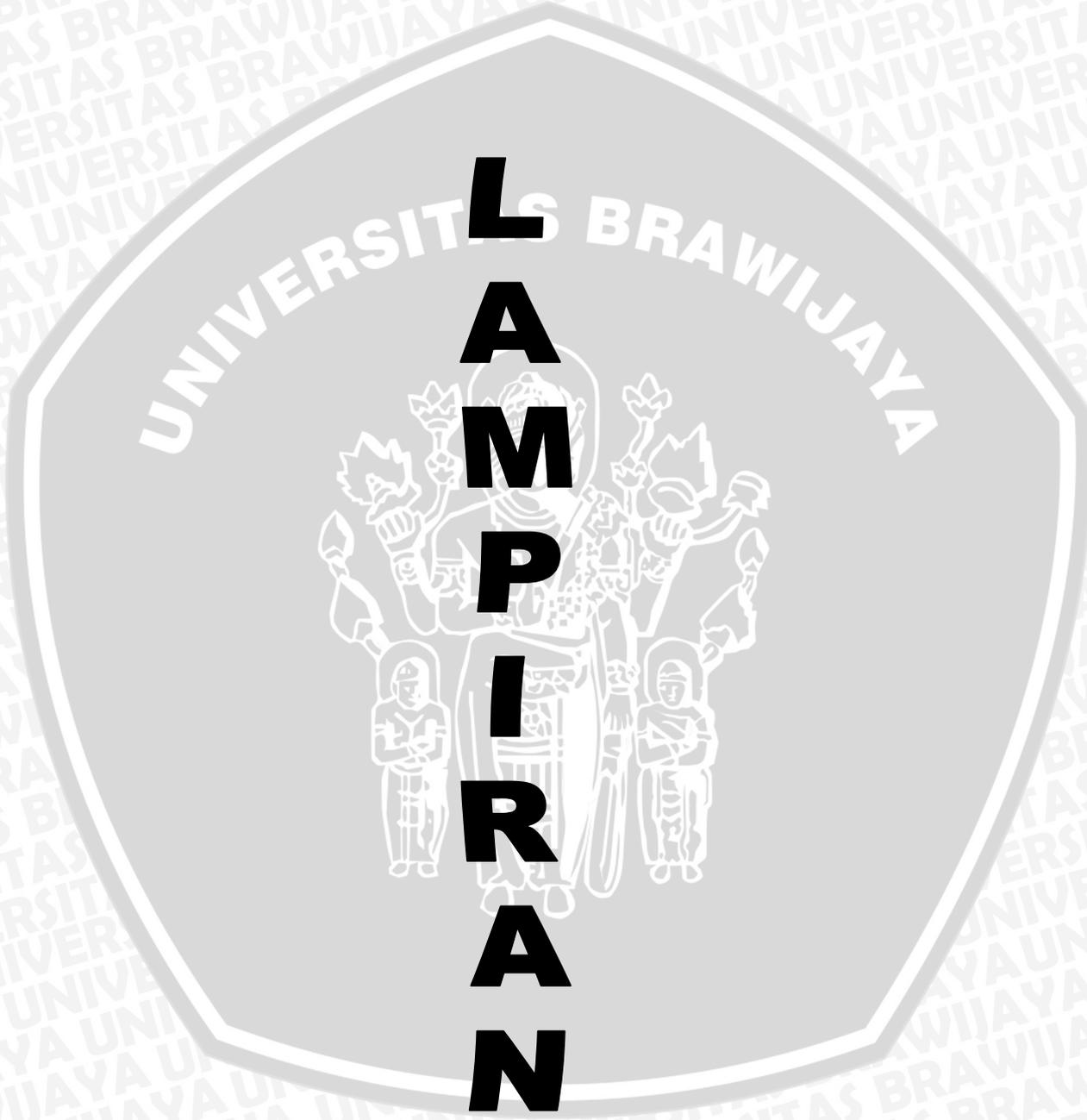
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Internet

Mirabile, Richard J., 1997. "Everything You Wanted to Know About Competency Modelling": <http://www.umich.edu>.





LAMPIRAN

A. Lembar Angket Guru
Strategi Pengembangan Peningkatan Mutu Guru

No	Aspek	No	Indikator dan Sub Indikator	Skor				
				0	1	2	3	4
1	Pengembangan Kemampuan Profesional Guru	1.	Penguasaan kurikulum dan materi pelajaran.					
		2.	Penguasaan pendekatan/metoda, pembuatan alat bantu/media pengajaran dan pendayagunaan alat laboratorium/ alat praktek.					
		3.	Pembuatan program semester dan program persiapan mengajar.					
		4.	Kegiatan belajar mengajar.					
		5.	Tugas Guru Bimbingan Penyuluhan (BP)					
		6.	Tugas Guru sebagai Wali Kelas/Guru Kelas dan Piket.					
		7.	Tugas Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.					
			Tugas Guru Pembina Kesenian					

		8.					
		9.	Pengelolaan Muatan Lokal.				
2	Pengembangan · Pengelolaan Lingkungan, Prasarana dan Sarana	1.	Pengelolaan lingkungan.				
		2.	Pengelolaan prasarana dan sarana				
3	Pengelolaan · Sekolah	1.	Penyusunan program				
		2.	Pengorganisasian sekolah				
		3.	Prosedur dan mekanisme kerja				
		4.	Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan				
		5.	Peningkatan disiplin guru				
		6.	Peningkatan disiplin murid				
4	Perkembangan · Supervisi	1.	Aspek-aspek yang disupervisi				
		2.	Sasaran supervisi				
		3.	Metode dan teknik supervisi				
		4.	Program pembinaan				

		5.	Alat-alat supervise				
5	Pengembangan Tes dan Penilaian Belajar	1.	Mekanisme tes dan penilaian kerja				
		2.	Kemampuan guru mengelola tes dan penilaian belajar.				
		3.	Prinsip-prinsip dasar penilaian				
6	Hubungan Sekolah dan Masyarakat	1.	Hubungan sekolah dengan orang tua siswa				
		2.	Hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat.				
		3.	Hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lain.				

B. Lampiran Angket Guru Kompetensi Guru

No	Aspek	No.	Indikator dan Sub Indikator	Skor				
				0	1	2	3	4
1	Kompetensi Pedagogik	1.	Berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan;					
		2.	Mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD);					
		3.	Melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan;					
		4.	Merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas;					
		5.	Melaksanakan pembelajaran <i>pro-perubahan</i> (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentasi, efektif dan menyenangkan);					
		6.	Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik;					
		7.	Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran,					

		kepribadian, bakat, minat dan karir;				
		8. Mengembangkan profesionalisme sebagai guru.				
2	Kompetensi Profesional	<p>1. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.</p> <p>2. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.</p>				
3	Kompetensi Kepribadian	<p>1. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.</p> <p>2. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.</p> <p>3. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan</p>				

		4.	keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.				
		4.	Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.				
		5.	Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.				
4	Kompetensi Sosial	1.	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.				
		2.	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.				
		3.	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.				

Rekapitulasi Nilai Rata-rata Siswa Kelas I s/d IV

Tahun Pelajaran 2010/2011

I. SDN BAKALAN PULE I

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	78	71	75	81	75	78	77	71	74	74	75	75	75	73	74	73	79	76	75	76	76	74	78	76	74	75	75	78	76	77
2	II	72	72	72	76	73	75	72	72	72	73	72	73	72	71	72	73	75	74	72	74	73	72	73	73	75	75	75	74	74	74
3	III	73	76	75	72	73	73	72	77	75	71	76	74	72	74	73	72	74	73	72	79	76	73	72	73	71	77	74	76	73	75
4	IV	74	74	74	73	75	74	72	74	73	75	73	74	72	73	73	74	76	75	72	74	73	75	75	75	74	76	75	72	74	73
5	V	72	75	74	74	73	74	72	75	74	73	74	74	72	72	72	74	74	74	71	72	72	73	74	74	72	75	74	71	74	73
6	VI	74	75	75	72	73	73	73	75	74	74	74	74	73	75	74	72	73	73	73	74	74	72	74	73	72	73	73	72	73	73
rata2				74			74			74			74			73			74			74			74			74			74

II. SDN BAKALAN PULE II

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	75	81	78	75	81	78	75	82	79	76	76	76	77	80	79	77	78	78	68	71	70	70	71	71	67	80	74	70	80	75
2	II	77	80	79	86	89	88	84	88	86	85	88	87	85	89	87	86	89	88	77	79	78	75	79	77	76	86	81	76	79	78
3	III	70	73	72	75	76	76	77	77	77	82	77	80	77	79	78	73	75	74	73	74	74	74	75	75	70	78	74	62	75	69
4	IV	75	76	76	75	77	76	72	74	73	73	75	74	72	75	74	73	74	74	73	75	74	72	76	74	74	76	75	72	76	74
5	V	73	75	74	75	76	76	73	75	74	72	73	73	73	75	74	74	76	75	72	76	74	73	75	74	72	74	73	73	76	75
6	VI	75	76	76	74	77	76	73	75	74	74	75	75	73	76	75	73	75	74	73	76	75	74	75	75	74	76	75	74	76	75
Rata2				76			78			77			77			78			77			74			74			75			74

III. SDN DUKUH AGUNG I

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	75	74	75	73	69	71	69	71	70	72	65	69	72	67	70	78	70	74	67	66	67	77	77	77	71	74	73	70	71	71
2	II	75	80	78	76	75	76	76	75	76	77	74	76	72	72	72	70	70	70	82	87	85	78	78	78	67	75	71	71	73	72
3	III	76	83	80	71	75	73	73	74	74	77	74	76	76	74	75	69	68	69	78	76	77	75	74	75	69	64	67	67	70	69
4	IV	78	78	78	65	74	70	69	76	73	67	76	72	70	79	75	68	77	73	78	77	78	76	77	77	67	76	72	71	74	73
5	V	80	80	80	77	83	80	81	81	81	80	84	82	82	84	83	73	80	77	81	82	82	78	78	78	73	80	77	70	78	74
6	VI	82	86	84	76	88	82	82	86	84	81	85	83	81	85	83	75	93	84	77	85	81	76	78	77	76	85	81	71	83	77
				79			75			76			76			76			74			78			77			73			72

IV. SDN DUKUH AGUNG II

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	75	76	76	73	74	74	75	77	76	72	73	73	69	72	71	68	70	69	71	73	72	72	75	74	68	70	69	68	71	70
2	II	72	73	73	72	75	74	72	73	73	68	68	68	63	65	64	72	73	73	72	75	74	71	73	72	69	70	70	65	68	67
3	III	70	72	71	73	75	74	70	72	71	71	73	72	62	67	65	69	71	70	70	72	71	72	74	73	70	72	71	66	69	68
4	IV	71	73	72	70	73	72	71	74	73	72	75	74	70	72	71	70	72	71	71	73	72	72	72	72	70	70	70	68	70	69
5	V	70	72	71	71	71	71	70	73	72	71	74	73	69	72	71	68	70	69	72	73	73	70	71	71	71	72	72	70	70	70
6	VI	73	75	74	73	74	74	75	75	75	72	75	74	72	72	72	74	75	75	71	73	72	71	72	72	72	72	72	71	72	72
				73			73			73			72			69			71			72			72			71			69

V. SDN PENGUMBULAN ADI I

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	68	69	69	67	69	68	70	73	72	68	71	70	65	69	67	65	67	66	68	68	68	70	70	70	65	67	66	69	70	70
2	II	70	70	70	71	72	72	69	70	70	69	70	70	66	68	67	68	70	69	69	70	70	68	71	70	65	68	67	68	68	68
3	III	69	69	69	72	73	73	68	71	70	68	69	69	67	69	68	70	72	71	68	69	69	69	70	70	68	70	69	67	69	68
4	IV	70	72	71	68	69	69	67	69	68	70	72	71	68	70	69	69	70	70	70	72	71	70	71	71	69	72	71	70	71	71
5	V	71	73	72	69	69	69	70	72	71	69	69	69	67	70	69	68	71	70	69	70	70	70	72	71	68	70	69	68	68	68
6	VI	70	71	71	72	75	74	73	75	74	75	75	75	72	74	73	73	76	75	72	72	72	73	74	74	71	72	72	72	73	73
				70			71			71			70			69			70			70			71			69			69

VI. SDN PENGUMBULAN ADI II

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	70	71	71	68	69	69	67	69	68	72	73	73	70	72	71	69	72	71	70	70	70	69	72	71	68	68	68	67	69	68
2	II	69	73	71	69	69	69	71	73	72	72	75	74	69	69	69	70	73	72	68	70	69	69	70	70	69	70	70	68	69	69
3	III	71	72	72	70	73	72	68	70	69	69	73	71	70	74	72	68	73	71	69	73	71	67	70	69	69	71	70	69	70	70
4	IV	70	71	71	71	73	72	69	69	69	70	70	70	68	70	69	68	72	70	70	71	71	70	71	71	69	72	71	70	70	70
5	V	72	72	72	68	71	70	72	73	73	71	73	72	69	74	72	68	70	69	72	74	73	71	74	73	72	73	73	70	70	70
6	VI	71	74	73	72	73	73	70	73	72	72	74	73	69	73	71	68	71	70	73	74	74	70	73	72	72	74	73	71	72	72
				71			71			70			72			71			70			71			71			71			70

VII. SDN GUMINING REJO

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	73	73	73	68	69	69	72	74	73	72	72	72	69	71	70	73	74	74	72	73	73	72	72	72	69	71	70	68	69	69
2	II	69	70	70	70	71	71	72	73	73	68	69	69	69	70	70	72	73	73	70	71	71	69	70	70	70	72	71	70	71	71
3	III	72	74	73	73	74	74	72	74	73	70	71	71	70	73	72	72	74	73	73	74	74	69	71	70	71	73	72	71	72	72
4	IV	73	74	74	72	72	72	72	72	72	73	74	74	70	72	71	70	70	70	71	71	71	72	73	73	71	72	72	72	72	72
5	V	74	74	74	73	73	73	72	73	73	72	72	72	73	74	74	70	73	72	71	73	72	72	73	73	72	74	73	71	72	72
6	VI	73	74	74	73	74	74	73	74	74	72	73	73	73	74	74	71	72	72	73	73	73	71	73	72	70	74	72	71	74	73
				73			72			73			72			72			72			72			71			72			71



Rekapitulasi Nilai Rata-rata Siswa Kelas I s/d IV

Tahun Pelajaran 2011/2012

I. SDN BAKALAN PULE I

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	80	78	79	78	76	77	79	77	78	74	75	75	75	77	76	78	76	77	77	79	78	82	85	84	75	70	73	84	79	82
2	II	82	86	84	78	81	80	77	78	78	76	78	77	76	78	77	78	80	79	82	85	84	76	87	82	76	80	78	76	81	79
3	III	82	85	84	80	84	82	81	83	82	79	81	80	77	80	79	79	82	81	80	83	82	83	86	85	84	85	85	82	84	83
4	IV	79	79	79	79	79	79	78	77	78	74	76	75	78	79	79	78	75	77	79	85	82	78	82	80	70	75	73	80	75	78
5	V	81	83	82	82	85	84	81	83	82	81	79	80	80	82	81	85	79	82	81	83	82	84	83	84	84	85	85	82	82	82
6	VI	80	84	82	81	84	83	82	85	84	83	84	84	81	83	82	84	85	85	82	84	83	84	84	84	82	84	83	81	83	82
				82			81			80			78			79			80			82			83			79			81

II. SDN BAKALAN PULE II

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	83	82	83	77	78	78	78	85	82	81	82	82	78	85	82	78	80	79	72	79	76	75	78	77	74	81	78	75	83	79
2	II	79	82	81	85	88	87	85	86	86	87	89	88	86	89	88	89	90	90	80	86	83	78	80	79	78	87	83	80	85	83
3	III	78	79	79	85	86	86	83	85	84	84	87	86	82	85	84	79	82	81	78	82	80	79	81	80	78	82	80	81	83	82
4	IV	79	78	79	82	83	83	82	84	83	83	85	84	80	86	83	78	80	79	77	79	78	76	80	78	80	83	82	85	86	86
5	V	80	81	81	82	85	84	81	83	82	85	86	86	83	84	84	85	87	86	81	82	82	80	83	82	85	86	86	85	89	87
6	VI	78	82	80	80	86	83	82	84	83	86	87	87	81	80	81	85	85	85	83	85	84	82	84	83	86	86	86	88	83	86
				80			83			83			85			83			83			80			80			82			84

III. SDN DUKUH AGUNG I

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	78	79	79	78	79	79	75	78	77	78	79	79	75	78	77	80	81	81	73	75	74	78	80	79	75	79	77	75	78	77
2	II	78	83	81	80	81	81	79	80	80	80	81	81	79	82	81	78	79	79	77	79	78	78	80	79	79	80	80	78	79	79
3	III	78	85	82	76	77	77	78	79	79	77	78	78	79	80	80	74	76	75	80	82	81	79	81	80	78	79	79	76	78	77
4	IV	80	85	83	79	80	80	78	80	79	78	79	79	80	82	81	79	81	80	80	82	81	80	83	82	79	80	80	78	80	79
5	V	82	85	84	78	85	82	82	85	84	84	85	85	85	86	86	78	83	81	83	85	84	80	85	83	84	85	85	79	82	81
6	VI	85	88	87	88	88	88	84	90	87	89	90	90	85	93	89	85	88	87	82	85	84	88	89	89	84	90	87	83	85	84
				82			81			81			82			82			80			80			82			81			79

IV. SDN DUKUH AGUNG II

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	79	79	79	80	81	81	78	82	80	79	81	80	78	78	78	77	79	78	76	78	77	75	76	76	73	74	74	75	77	76
2	II	78	80	79	79	82	81	78	81	80	78	80	79	76	79	78	80	81	81	79	79	79	78	79	79	79	80	80	75	78	77
3	III	77	79	78	80	82	81	79	83	81	81	81	81	79	80	80	80	80	80	79	80	80	79	79	79	75	79	77	78	79	79
4	IV	75	78	77	79	79	79	79	79	79	80	82	81	78	79	79	79	80	80	78	79	79	78	78	78	78	79	79	79	79	79
5	V	76	79	78	80	80	80	78	79	79	81	82	82	79	79	79	80	81	81	79	79	79	78	79	79	78	79	79	78	79	79
6	VI	80	81	81	80	80	80	79	81	80	80	81	81	79	80	80	81	82	82	79	80	80	79	80	80	79	79	79	78	78	78
				78			80			80			81			79			80			79			78			78			78

V. SDN PENGUMBULAN ADI I

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	75	77	76	78	80	79	74	74	74	73	77	75	72	75	74	71	73	72	73	75	74	74	76	75	75	78	77	72	76	74
2	II	79	80	80	74	76	75	78	78	78	77	79	78	76	79	78	73	78	76	75	79	77	75	80	78	76	78	77	74	75	75
3	III	78	78	78	77	79	78	79	79	79	75	78	77	78	79	79	77	79	78	78	80	79	78	80	79	77	79	78	76	78	77
4	IV	77	80	79	79	79	79	81	81	81	76	79	78	78	79	79	78	80	79	78	80	79	78	79	79	79	79	79	78	79	79
5	V	76	78	77	78	79	79	79	79	79	76	78	77	79	80	80	78	79	79	79	79	79	79	80	80	79	78	79	76	79	78
6	VI	78	79	79	80	81	81	78	80	79	79	81	80	81	83	82	80	85	83	83	83	83	81	83	82	81	83	82	78	78	78
				78			78			78			77			78			78			79			79			79			77

VI. SDN PENGUMBULAN ADI II

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	75	78	77	74	76	75	76	78	77	75	78	77	76	79	78	76	79	78	80	82	81	76	77	77	77	78	78	75	75	75
2	II	74	78	76	75	79	77	75	79	77	77	80	79	78	80	79	76	79	78	80	81	81	75	79	77	78	80	79	76	77	77
3	III	75	79	77	76	79	78	76	79	78	78	80	79	76	79	78	75	78	77	79	80	80	76	78	77	79	80	80	77	78	78
4	IV	78	80	79	78	79	79	77	79	78	79	80	80	77	80	79	76	78	77	77	79	78	77	79	78	78	79	78	78	78	78
5	V	77	79	78	78	80	79	78	79	79	78	80	79	75	80	78	79	80	80	78	80	79	78	80	79	79	80	80	78	80	79
6	VI	78	80	79	79	81	80	80	81	81	80	82	81	78	81	80	78	79	79	79	81	80	78	81	80	79	80	80	79	79	79
				78			78			78			79			78			78			80			78			79			78

VII. SDN GUMINING REJO

No	Kelas	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran																													
		Agama			PKn			B. Indo			IPA			IPS			MTK			Ketrampilan			PJOK			B. Daerah			B. Inggris		
		S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2	S1	S2	Rata2
1	I	78	79	79	79	80	80	79	79	79	78	80	79	78	79	79	78	78	78	78	79	79	79	79	79	78	79	79	78	78	78
2	II	77	78	78	78	79	79	78	79	79	79	79	79	78	79	79	79	80	80	78	79	79	78	79	79	79	79	79	78	79	79
3	III	79	80	80	76	78	77	79	79	79	78	80	79	79	79	79	78	78	78	78	80	79	77	79	78	78	78	78	79	79	79
4	IV	78	79	79	78	79	79	78	80	79	79	80	80	80	80	80	79	80	80	79	80	80	78	79	79	79	80	80	77	78	78
5	V	79	79	79	79	80	80	78	78	78	79	80	80	80	81	81	81	81	81	80	81	81	79	80	80	80	81	81	79	80	80
6	VI	79	80	80	80	81	81	80	81	81	81	82	82	79	81	80	81	82	82	80	81	81	80	81	81	81	82	82	79	80	80
				79			79			79			80			79			80			79			79			80			79



WAWANCARA 1

Materi wawancara disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

1. Apakah seluruh penerima bantuan Blockgrant KKG di Kabupaten Lamongan sudah mengetahui landasan/ pedoman Program Blockgrant KKG ?
2. Apakah penerima Blockgrant KKG sudah mengetahui mekanisme pemberian bantuan Blockgrant KKG ?
3. Apakah tujuan kegiatan dari Implementasi Program Blockgrant Pemberdayaan KKG ?
4. Apakah sudah di sosialisasikan Program Blockgrant pemberdayaan KKG ke seluruh gugus sekolah di Kabupaten Lamongan ?
5. Bagaimana konsekuensi penerima bantuan program Blockgrant pemberdayaan KKG terhadap peningkatan mutu guru ?

WAWANCARA 2

Materi wawancara disampaikan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung

1. Apakah Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung sudah mensosialisasikan ke KKG gugus 02 ?
2. Apakah penerima Blockgrant KKG sudah membuat proposal pelaksanaannya?
3. Siapa yang diberi tanggung jawab untuk memberi pelaksanaan Inservice Learning KKG gugus 02 Kecamatan Tikung ?
4. Bagaimana pelaksanaan Inservice Learning KKG gugus 02 Kecamatan Tikung ?
5. Apakah setelah selesai pelaksanaan Blockgrant KKG membuat laporan ?

WAWANCARA 3

Materi wawancara disampaikan kepada Ketua KKG Gugus 02 Kecamatan Tikung

1. Apakah ketua KKG sudah mensosialisasikan ke anggotanya mengenai Blockgrant KKG ?
2. Apakah setelah sosialisasi membentuk panitia pelaksana pelatihan ?
3. Apakah panitia langsung membuat proposal ?
4. Bagaimana pelaksanaan Inservice Learning KKG gugus 02 kec. Tikung ?
5. Apa tindak lanjut setelah pelaksanaan Inservice Learning KKG gugus 02 Kec. Tikung ?

WAWANCARA 4

Materi wawancara disampaikan kepada Narasumber Pelatihan *Blockgrant* KKG

1. Apa tujuan pelaksanaan pelatihan PKG pada penilaian kinerja guru ?
2. Bagaimana tingkat kehadiran / keaktifan peserta dalam pelatihan PKG ?
3. Metode apa yang digunakan dalam pelatihan PKG ?
4. Apakah materi dan waktu yang digunakan dalam pelatihan sesuai standar ?
5. Bagaimana fasilitas / saran dan prasarana yang di sampaikan dalam pelatihan PKG ?
6. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki peserta setelah pelatihan PKG ?
7. Dasar hukum apa saja yang wajib di fahami peserta pelatihan PKG ?
8. Bagaimana daya serap peserta pelatihan PKG, terhadap materi yang di sajikan?
9. Bagaimana cara menentukan keberhasilan peserta dalam pelatihan PKG ?
10. Tindak lanjut apa yang harus dilakukan peserta pelatihan PKG yang sudah dinyatakan lulus dalam pelatihan PKG ?

WAWANCARA 5

Materi wawancara disampaikan kepada Peserta Pelatihan *Blockgrant* KKG

1. Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan dengan baik dan aktif ?
2. Apa yang bapak/ibu belum fahami pada materi pelatihan *Blockgrant* KKG tersebut ?
3. Apa yang bapak/ibu dapat fahami pada materi pelatihan *Blockgrant* KKG tersebut ?
4. Upaya apa yang bapak/ibu lakukan setelah melaksanakan pelatihan *Blockgrant* KKG ?
5. Kompetensi apa saja yang bapak/ibu lakukan sebelum melaksanakan pelatihan ?
6. Kompetensi apa saja yang bapak/ibu lakukan setelah pelatihan ?
7. Apakah bapak/ibu telah melaksanakan hasil pelatihan yang dilakukan ?
8. Apa saja yang mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut ?
9. Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan hasil pelatihan tersebut ?
10. Apa saran/usul bapak/ibu mengenai pelatihan tersebut ?

WAWANCARA 6

Materi wawancara disampaikan kepada Panitia Pelaksana *Blockgrant* KKG

1. Apakah untuk mendapatkan *Blockgrant* KKG perlu membuat proposal ?
2. Untuk membuat proposal petunjuk dari mana ?
3. Apa dasar hukum pelaksanaan *Blockgrant* peningkatan mutu ini ?
4. Berapa jumlah dana yang diterima oleh panitia ?
5. Untuk apa saja penggunaan dana tersebut ?
6. Apakah setelah kegiatan membuat laporan pelaksanaannya ?
7. Apa hasil yang di harapkan dalam pelaksanaan *Blockgrant* KKG ini ?
8. Kepada siapa melaporkan hasil pelaksanaan *Blockgrant* ?
9. Berapa persen kehadiran peserta ?
10. Apakah semua peserta mendapat materi pelaksanaan *Blockgrant* ?

Foto-foto Kegiatan Workshop
Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



KELOMPOK KERJA GURU (KKG)

GUGUS SEKOLAH 01 KECAMATAN TIKUNG

Sekretariat : SD INTI SDN Bangkalan Pule I Jln. MANTUP Kec. Tikung Kab. Lamongan

SURAT KETERANGAN

Nomor: 421.2/253/413.101.04.01/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua KKG Gugus Sekolah 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa :

Nama : VITA UZLIFATUL ILMA
NIM : 0810310136
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Telah melaksanakan penelitian di SDN Gugus Sekolah 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan pada 7 Oktober s/d 5 Desember 2013 dengan judul ""Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Peningkatan Mutu Guru".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tikung, 6 Desember 2013

Mengetahui,

Ketua Gugus Sekolah 02 Kec. Tikung


UMU ZUHRO, S.Pd

NIP. 19590515 197803 2 011

Ketua KKG Gugus Sekolah 02

Kec. Tikung


KADIS, S.Pd

NIP. 19690911 199308 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TIKUNG
 Jalan Raya Mantup No. 24 Tikung Tlp. (0322) 311260
 e-mail: dinpdk@lamongan.go.id, Web Site: www.lamongan.go.id
 TIKUNG – 62281

Tikung, 4 Oktober 2013

Nomor : 421.2/ 599 / 413.101.04 / 2013
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Melaksanakan
 Penelitian/Riset

Kepada :
 Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri
 dalam Gugus Sekolah 02 Kec. Tikung

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 3 Oktober 2013, Nomor 11645/UN 10.3/PG/2013, Perihal Permohonan Ijin dan Bantuan Melaksanakan Penelitian yang berkaitan dengan Penyusunan skripsi, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan ijin kepada :

Nama : VITA UZLIFATUL ILMA
 NIM : 0810310136
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Alamat : Geneng RT.002 RW.005 Desa Deket Kulon,
 Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan

Untuk mengadakan Penelitian/Riset di SD Negeri dalam Gugus Sekolah 02 Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul: "Implementasi Program *Blockgrant* Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Peningkatan Mutu Guru (Studi di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tahun Ajaran 2010/2011)" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
2. Tidak ada unsur paksaan
3. Dapat menyimpan hal-hal yang bersifat rahasia
4. Waktu 7 Oktober s/d 5 Desember 2013

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala UPT Dinas Pendidikan
 Kecamatan Tikung

Hi. SULTIANAH, S.Pd, M.P.d
 Pembina
 NIP. 19590712 197803 2 006

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

1. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
2. Yth. Sdr. VITA UZLIFATUL ILMA

